

BAB IV

PEMBAHASAN

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, instansi pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi dalam menyediakan layanan informasi yang transparan, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Website dan media sosial sebagai bagian dari media komunikasi digital memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menguraikan secara sistematis mengenai bentuk pemanfaatan website dan media sosial.

4.1 Pemanfaatan Website dalam Penyebaran Informasi Publik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang infrastruktur jalan, permukiman, dan tata ruang. Dalam era digital, pemanfaatan website resmi menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Website resmi pemerintah provinsi Sumatera Barat yang dapat diakses menjadi wadah publikasi berbagai informasi dari masing - masing perangkat daerah, termasuk Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Pemanfaatan website tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang mewajibkan badan publik untuk menyediakan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat.

4.1.1 Bentuk Informasi yang Disediakan melalui Website

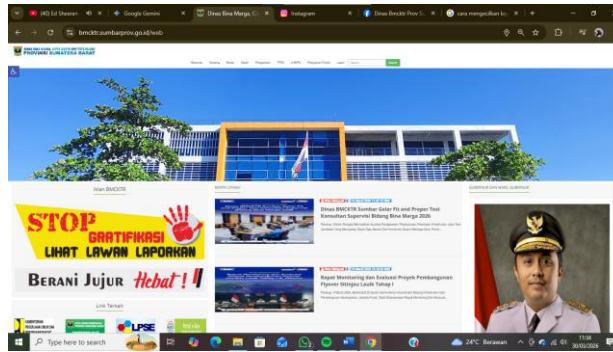
Dalam praktiknya, pemanfaatan website oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat diakses melalui website resminya yaitu:

<https://bmcktr.sumbarprov.go.id/details/pages/89>.

1. Menu “Beranda”

Tampilan beranda atau *dashboard* pada website resmi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan tampilan awal yang berfungsi sebagai pusat informasi utama. *Dashboard* ini dirancang untuk memberikan gambaran umum mengenai identitas instansi, akses menu layanan, serta informasi terbaru yang relevan dengan tugas dan fungsi dinas. Pada bagian atas halaman, terdapat identitas resmi instansi berupa logo dan nama dinas yang terintegrasi dengan identitas pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan legitimasi dan kedudukan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai perangkat daerah yang berada di bawah pemerintahan provinsi.

Menu navigasi utama yang tersedia pada dashboard meliputi: Beranda, Tentang, Berita, Galeri, Pengaduan, PPID, LHKPN, Pelayanan Publik, dan Laporan. Keberadaan menu-menu tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Struktur menu yang sistematis mencerminkan upaya penyediaan informasi yang terorganisir dan transparan. Secara visual, *dashboard* menampilkan foto gedung kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sebagai banner utama. Penggunaan tampilan visual ini berfungsi untuk memperkuat citra institusi serta memberikan kesan profesional dan modern.



Gambar 4. 1 Halaman Menu “Beranda”

Sumber: <https://bmcktr.sumbarprov.go.id/details/pages/89>

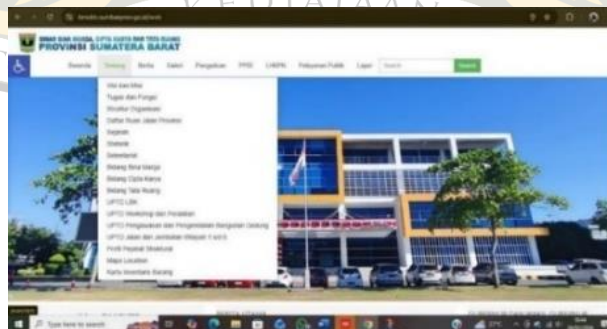
Pada bagian bawah dashboard pada website menampilkan beberapa fitur penting, di mana pada posisi kiri terdapat kolom iklan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang sebagai bentuk edukasi publik sekaligus penguatan nilai integritas di lingkungan pemerintah. Sementara di bawah iklan terdapat bagian Link terkait, yang menghubungkan pengunjung berbagai instansi dan layanan eksternal. Fitur ini memungkinkan adanya integrasi antar lembaga serta mendukung konsep *good governance* melalui konektivitas sistem informasi. Sementara itu, pada sisi kanan ditampilkan profil Gubernur Sumatera Barat sebagai representasi pimpinan daerah, yang memperkuat legitimasi kelembagaan dan menunjukkan sinergi antara dinas teknis dengan kepala daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.

Bagian paling bawah (*footer*) pada website resmi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Karya Provinsi Sumatera Barat berfungsi sebagai penutup halaman sekaligus pusat informasi tambahan yang bersifat ringkas namun penting. Terdapat juga *Latest Pots*, yang menampilkan daftar berita terbaru lengkap dengan tanggal dan waktu publikasi. Fitur ini membantu pengunjung mengetahui aktivitas dan informasi terkini tanpa harus kembali kehalaman utama. Selanjutnya, juga ada kolom *Useful Links*, dimana tersedianya tautan cepat menuju menu penting seperti Hubungi Kami, Berita Utama, Visi Misi, Galeri Foto, dan Galeri Video.

Pada bagian kanan *footer* ditampilkan informasi *Contact Us*, yang memuat alamat kantor, nomor telepon, dan alamat email resmi dinas. Dengan adanya kontak resmi, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, permohonan informasi, maupun pengaduan secara langsung. Di bagian paling bawah tercantum keterangan hak cipta oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai pengelola sistem informasi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan infrastruktur digital pemerintahan. Secara keseluruhan, bagian *footer* website tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap tampilan, tetapi juga sebagai elemen strategis yang mendukung transparansi, aksesibilitas informasi.

2. Menu “Tentang”

Menu “Tentang” pada website Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian yang memuat informasi mendasar mengenai profil dan identitas kelembagaan. Menu ini berfungsi sebagai dasar utama mengenai profil dan identitas kelembagaan, sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat yang ingin memahami struktur, tugas, serta ruang lingkup kerja dinas secara lebih mendalam.



Gambar 4. 2 Tampilan Menu “Tentang”

Sumber: <https://bmcktr.sumbarprov.go.id/details/pages/89>

Pada menu ini terdapat beberapa kategori informasi, yaitu: Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Daftar Ruas Jalan, Sejarah, Statistik,

Sekretariat, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, UPTD LBK, UPTD Workshop dan Peralatan, UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung, UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah 1 s/d 6, Profil Pejabat Struktural, *Maps Location*, dan Kartu Investaris Barang. Penyediaan informasi tersebut menunjukkan komitmen instansi dalam menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik.

a. Visi dan Misi

Pada sub menu visi dan misi yang tersedia di website resmi memuat mengenai arah kebijakan, tujuan strategis dinas, serta komitmen jangka panjang dinas dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai oleh dinas di masa depan, khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan jalan, jembatan, permukiman, dan penataan ruang yang berkelanjutan. Sementara itu, misi menjabarkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut melalui program dan kegiatan operasional. Dengan adanya publikasi visi dan misi pada website, masyarakat dapat memahami arah pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan, sehingga tercipta keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan publik.

b. Tugas dan Fungsi

Pada sub menu tugas dan fungsi yang tersedia di website resmi memberikan penjelasan mengenai kewewenangan, ruang lingkup pekerjaan, serta tanggung jawab dinas dalam penyelenggaraan urusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian urusan pemerintahan. Publikasi tugas dan fungsi melalui website memiliki nilai

strategis dalam meningkatkan transparansi kelembagaan. Masyarakat dapat memahami batas kewenangan dinas, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

c. Struktur Organisasi

Pada sub menu struktur organisasi yang tersedia di website resmi menampilkan susunan jabatan, hierarki kepemimpinan, serta pembagian unit kerja secara terstruktur. Informasi ini memuat kedudukan kepala dinas sebagai pimpinan tertinggi, sekretariat sebagai unsur pendukung administrasi, serta bidang-bidang teknis, seperti Bidang Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang yang memiliki kewenangan sesuai ruang lingkup masing-masing. Struktur ini juga mencerminkan pembagian tanggung jawab yang jelas antarunit kerja, mulai dari aspek perencanaan program, pengelolaan anggaran, pelaksanaan teknis pembangunan infrastruktur, hingga pengendalian tata ruang wilayah.

d. Daftar Ruas Jalan Provinsi

Pada sub menu daftar ruas jalan provinsi di website resmi menyajikan informasi terkait nama ruas jalan, panjang jalan, kondisi kemantapan, serta status penanganan jalan provinsi di wilayah Sumatera Barat. Data ini umumnya dalam bentuk tabel atau infografis yang memuat persentase kondisi jalan mantap dan tiap dimasing-masing ruas. Informasi tersebut membahas mengenai kinerja pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Melalui publikasi kondisi akhir tahun, masyarakat dapat mengetahui tingkat kemantapan jalan sebagai indikator kualitas layanan infrastruktur. Selain itu, informasi ini juga dapat

menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan jalan ke depannya.

e. Sejarah

Pada sub menu sejarah yang tersedia di website resmi memuat informasi mengenai latar belakang kelembagaan serta sejarah pembangunan gedung kantor dinas. Dalam website tersebut juga menjelaskan pengertian dan tugas serta undang- undang yang mengatur tentang Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya menjelaskan peristiwa penting yang memengaruhi keberadaan fisik gedung kantor dinas, khususnya gempa bumi terjadi pada tahun 2009. Pada sub menu sejarah ini tidak hanya menyajikan kronologi pembangunan gedung, tetapi menggambarkan dinamika kelembagaan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan kebencanaan di wilayah sumatera barat. Informasi tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah daerah mendukung sarana prasarana yang lebih aman, fungsional, dan mendukung kinerja organisasi.

f. Statistik

Pada sub menu statistik yang tersedia di website resmi menyajikan data yang sama seperti bagian ruas jalan provinsi, berisi data kuantitatif terkait kinerja dan capaian pembangunan dibidang masing-masing. Informasi yang ditampilkan umumnya berupa angka persentase, grafik, maupun geografis yang menggambarkan kondisi infrastruktur daerah secara periodik. Penyajian dalam bentuk visual memudahkan masyarakat dalam memahami informasi teknis yang sebelumnya bersifat kompleks. Dengan adanya data yang terukur,

masyarakat dapat menilai sejauh mana target pembangunan telah tercapai serta mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan peningkatan.

g. Sekretariat

Pada sub menu sekretariat yang tersedia di website resmi memuat informasi mengenai tugas dan fungsi sekretariat sebagaimana diatur dalam ketentuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sekretariat memiliki fungsi koordinatif yang menghubungkan pimpinan dengan seluruh bidang teknis, sehingga memastikan pelaksanaan program berjalan secara terencana dan tertib secara administrasi. Pada sub menu ini menunjukkan bahwa sekretariat memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola organisasi secara menyeluruh.

h. Bidang Bina Marga

Pada sub menu bidang bina marga yang tersedia di website resmi menyajikan informasi mengenai unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan provinsi. Menyajikan uraian tugas, fungsi, serta ruang lingkup kewenangan bidang Bina Marga, yang meliputi perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan kapasitas jalan, rehabilitasi, hingga pemeliharaan rutin dan berkala jalan serta jembatan provinsi. Publikasi informasi tentang bina marga melalui website memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai proses pengelolaan jalan provinsi secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

i. Bidang Cipta Karya

Pada sub menu bidang cipta karya yang tersedia di website resmi memuat informasi mengenai unit kerja yang bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman serta bangunan gedung di tingkat provinsi. Bidang ini memiliki peran dalam meningkatkan kualitas lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana dasar, serta penataan kawasan yang layak dan berkelanjutan.

Informasi yang disajikan mencakup tugas dan fungsi bidang Cipta Karya, ruang lingkup program kerja, serta dokumentasi kegiatan pembangunan. Juga berperan dalam pembinaan teknis serta pengawasan terhadap standar bangunan dan infrastruktur permukiman. Publikasi informasi bidang cipta karya melalui website memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

j. Bidang Tata Ruang

Pada sub menu bidang tata ruang yang tersedia di website resmi memuat informasi mengenai unit kerja yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengaturan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Informasi dalam sub menu mencakup tugas dan fungsi bidang tata ruang, ruang lingkup kewenangan, serta program kerja berkaitan dengan penyusunan dan evaluasi RTRW provinsi.

k. UPTD LBK

Pada sub menu UPTD LBK yang tersedia di website resmi memuat informasi mengenai unit pelaksana teknis daerah UPTD yang berada di bawah koordinasi dinas, khususnya yang berkaitan dengan layanan laboratorium atau balai pengujian konstruksi LBK. Pada sub menu UPTD LBK terdapat 3 poin didalamnya, seperti UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Si Ety, dan QR Code PA Haji.

Pada sub menu UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dijelaskan tugas dan fungsi UPTD LBK, ruang lingkup layanan pengujian material konstruksi, serta peranannya dalam memastikan mutu pekerjaan pembangunan jalan, jembatan, maupun bangunan gedung. Layanan yang diberikan dapat meliputi pengujian tanah, beton, aspal, dan material konstruksi lainnya sebagai bagian proses pengendalian mutu proyek. Hal ini menunjukkan bahwa setiap proses pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik proyek, tetapi juga memperhatikan standar teknis dan aspek keselamatan konstruksi.

Sub menu ini juga membahas mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Bahan Konstruksi yang berada di bawah naungan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Melalui layanan pengujian yang terstandar, UPTD ini berfungsi untuk mendukung pengawasan kualitas pekerjaan konstruksi, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak ketiga. Keberadaan sub menu ini juga menunjukkan bentuk transparansi informasi kepada publik terkait tugas, fungsi, dan peran laboratorium dalam mendukung pembangunan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar.

Sub menu UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi pada website Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat menampilkan halaman informasi yang dilengkapi visual fasilitas laboratorium sebagai gambaran nyata kegiatan pengujian bahan konstruksi. Penyajian ini menunjukkan komitmen dinas dalam memberikan transparansi mengenai fasilitas dan layanan teknis yang tersedia, sekaligus memperkuat citra profesionalitas institusi dalam menjamin mutu material konstruksi untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat. Jika ingin lebih lengkap dapat diakses dari link

https://drive.google.com/file/d/1oR4t8QMfyBAEPGond5eKfeD0ZZMWSRSE/view?usp=drive_link

l. UPTD Workshop dan Peralatan

Pada sub menu UPTD Workshop dan Peralatan yang tersedia di website resmi memuat informasi mengenai tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis yang berperan dalam pengelolaan serta penyediaan peralatan pendukung pembangunan infrastruktur daerah. Berdasarkan informasi yang ditampilkan, UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, serta pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang, khususnya dalam penyimpanan peralatan, bahan jalan dan jembatan, layanan perbengkelan, serta penanganan gangguan dan pembinaan.

m. UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung

Pada sub menu UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung yang tersedia di website resmi memuat informasi mengenai tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan serta pengendalian bangunan gedung. Juga menjelaskan bahwa UPTD memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan Gedung. Selain itu, UPTD juga melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyajian informasi ini memberikan gambaran yang jelas peran dan tanggung jawab UPTD dalam mendukung tertib pembangunan gedung di Provinsi Sumatera Barat.

n. UPTD Jalan dan Jembatan 1 s/d 6

Sub menu UPTD Jalan dan Jembatan 1 s/d 6 yang tersedia di website resmi memuat informasi mengenai tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan pada beberapa wilayah kerja diprovinsi sumatera barat. Juga menjelaskan bahwa UPTD Jalan dan Jembatan 1 s/d 6 memiliki tugas menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan anggaran kegiatan, serta melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin maupun berkala. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam pengendalian dan pelaporan kondisi jalan dan jembatan. Pembagian wilayah kerja dari 1 s/d 6 menunjukkan bahwa pengelolaan tidak dilakukan secara terpusat, melainkan dibagi ke beberapa wilayah agar pengawasan lebih efektif dan penanganan infrastruktur bisa dilakukan lebih cepat.

o. Profil Pejabat Struktural

Sub menu profil pejabat struktural yang tersedia di website resmi menampilkan biodata pejabat yang menduduki jabatan struktural, khususnya Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan dinas. Informasi ini disajikan dalam bentuk kategori jabatan yang dapat diakses secara terpisah, sehingga memudahkan pengguna dalam menelusuri data pejabat sesuai dengan tingkat strukturnya. Halaman tersebut menampilkan pembagian pejabat berdasarkan jenjang eselon yang menggambarkan struktur hierarki organisasi. Setiap kategori memuat informasi mengenai identitas pejabat berupa CV, sehingga memperlihatkan sistem birokrasi yang terstruktur dan transparan.

p. Maps Location

Sub menu *maps location* yang tersedia di website resmi menampilkan informasi lokasi kantor dinas dalam bentuk peta digital yang terintegrasi dengan layanan pemetaan daring. Fitur ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui posisi geografis kantor secara akurat, lengkap dengan petunjuk arah dan akses transportasi menuju lokasi. Melalui fitur ini, masyarakat tidak hanya memperoleh alamat tertulis, tetapi juga tampilan peta yang membantu dalam perencanaan kunjungan koordinasi kegiatan, maupun keperluan administrasi lainnya.

q. Kartu Inventaris Barang

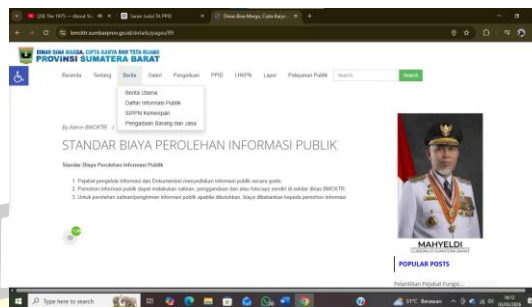
Sub menu kartu inventaris barang yang tersedia di website resmi memuat informasi terkait pencatatan dan pengelolaan aset milik daerah yang berada di bawah kewenangan dinas. Kartu inventaris barang merupakan dokumen administratif yang berfungsi sebagai instrument pengendalian dan pendataan terhadap barang milik daerah baik berupa tanah, bangunan, peralatan, maupun infrastruktur lainnya.

Informasi yang disajikan mencakup klasifikasi aset, nomor register, kondisi barang, lokasi, serta nilai perolehan. Penyajian data tersebut menunjukkan adanya sistem administrasi yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Digitalisasi data inventaris memudahkan proses monitoring, evaluasi, serta pelaporan aset secara berkala.

3. Menu “Berita”

Tampilan pada menu “Berita” yang tersedia di website Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berfungsi sebagai

media publikasi informasi terkini terkait kegiatan, program, dan kebijakan dinas. Menu ini memuat berbagai informasi seperti Berita Utama, Daftar Informasi Publik, SIPPN Kemenpan, dan Pengadaan Barang dan Jasa.



Gambar 4.3 Tampilan Menu “Berita”

Sumber: <https://bmcktr.sumbarprov.go.id/details/pages/89>

Keberadaan menu ini berperan penting dalam mendukung keterbukaan informasi public. Melalui publikasi ini, masyarakat dapat mengetahui capaian kinerja.

a. Berita Utama

Berita utama berfungsi sebagai media publikasi informasi terkini terkait kegiatan, program, dan capaian kinerja dinas. Halaman ini menampilkan berbagai berita yang disusun secara kronologis dan dilengkapi dengan judul, tanggal publikasi, ringkasan isi berita, serta dokumentasi visual kegiatan. Melalui ini, masyarakat dapat mengetahui perkembangan proyek infrastruktur, agenda koordinasi pemerintah, serta kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh dinas. Keberadaan sub menu ini menjadi bagian dari implementasi keterbukaan informasi publik sebagai sarana komunikasi digital untuk membangun transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

b. Daftar Informasi Publik

Pada sub menu Daftar Informasi Publik yang tersedia di website resmi merupakan bagian dari layanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

(PPID) yang menyediakan akses informasi kepada masyarakat sesuai prinsip keterbukaan informasi publik. Informasi yang tersedia dikelompokkan berdasarkan bidang atau unit kerja, seperti Bina Marga, Cipta Karya, Sekretariat, Tata Ruang, serta UPTD terkait, sehingga memudahkan pengguna dalam menelusuri dokumen atau data yang dibutuhkan. Penyajian dalam bentuk kategori tersebut menunjukkan sistem pengelolaan informasi yang terstruktur dan sistematis, sekaligus mencerminkan komitmen dinas dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh publik.

c. SIPPN Kemenpan

Pada sub menu SIPPN yang tersedia di website resmi juga tersedia di portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang merupakan platform sistem informasi pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi terkait berbagai jenis layanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah.

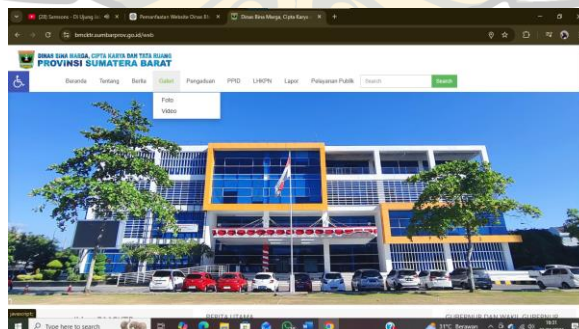
Melalui tampilan yang mudah digunakan dan dilengkapi fitur pencarian, masyarakat dapat dengan mudah menelusuri informasi layanan, persyaratan, prosedur, jangka waktu, hingga biaya yang dibutuhkan. Perubahan dari SIPPN menjadi CariYanlik menunjukkan upaya pengembangan sistem agar lebih terintegrasi, informatif, dan ramah pengguna. Kehadiran platform ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik berbasis digital di Indonesia.

d. Pengadaan Barang dan Jasa

Pada sub menu ini ditampilkan halaman yang berisi informasi mengenai pengumuman pengadaan barang dan jasa pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Terdapat dokumen yang berisi data Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2025 yang memuat daftar kegiatan pengadaan beserta informasi pendukungnya. Setiap file ditampilkan dalam bentuk simbol pratinjau sehingga memudahkan pengguna untuk mengenali dan mengakses dokumen yang tersedia. Secara keseluruhan, tampilan submenu ini berfungsi sebagai media penyampaian informasi pengadaan secara terbuka kepada masyarakat dengan menyediakan dokumen resmi yang dapat diakses secara langsung melalui website.

4. Menu “Galeri”

Pada menu “Galeri” menampilkan halaman yang berisi dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dan video. Hal ini memudahkan pengguna untuk memilih jenis dokumentasi yang ingin dilihat. Melalui submenu ini, pengunjung dapat melihat arsip kegiatan, acara resmi, serta aktivitas dinas yang telah dilaksanakan. Secara keseluruhan, menu ini berfungsi sebagai media informasi visual yang memberikan gambaran nyata mengenai aktivitas dan kinerja instansi kepada masyarakat.



Gambar 4. 4 Tampilan Menu “Galeri”

Sumber: <https://bmcktr.sumbarprov.go.id/details/pages/89>

a. Foto

Sub menu Foto menampilkan kumpulan dokumentasi kegiatan yang disajikan dalam bentuk gambar. Pada bagian atas halaman terdapat judul “Galeri Foto” sebagai penanda bahwa halaman ini khusus menampilkan arsip foto kegiatan instansi. Setiap foto dilengkapi dengan keterangan singkat seperti nama galeri, nama pengunggah, jumlah pengunjung, serta tanggal dan waktu unggahan. Informasi tersebut membantu pengguna mengetahui asal dan waktu dokumentasi kegiatan tersebut diunggah ke website. Secara umum, tampilan sub menu foto berfungsi sebagai media publikasi visual yang memperlihatkan aktivitas dan hasil kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat secara terbuka dan informatif.

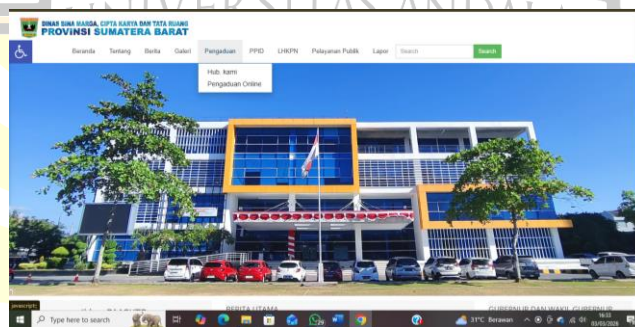
b. Vidio

Sub menu Video menampilkan daftar dokumentasi kegiatan dalam bentuk video. Pada halaman ini, setiap video ditampilkan dengan lambang pemutar (*play*) sebagai penanda bahwa konten tersebut berupa tayangan audiovisual. Di samping setiap tampilan video, terdapat judul kegiatan yang menjelaskan isi video tersebut. Setiap video juga dilengkapi dengan informasi tambahan seperti nama pengunggah, jumlah penayangan, serta tanggal dan waktu unggah. Hal ini memudahkan pengunjung untuk mengetahui kapan video tersebut dipublikasikan dan siapa yang mengunggahnya. Pengguna dapat memilih salah satu video dengan mengklik ikon pemutar.

5. Menu “Pengaduan”

Pada bagian menu “Pengaduan” yang tersedia di website resmi terdapat dua pilihan, yaitu “Hub. kami” yang berfungsi sebagai halaman untuk melihat atau

menghubungi kontak instansi, serta “Pengaduan Online” yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau aspirasi secara langsung melalui sistem online. Di dalam Tampilan ini menunjukkan bahwa website tersebut menyediakan fasilitas komunikasi dan pelayanan publik agar masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan pengaduan terkait infrastruktur atau pelayanan yang dikelola oleh dinas tersebut.



Gambar 4. 5 Tampilan Menu “Pengaduan”

Sumber: <https://bmcktr.sumbarprov.go.id/details/pages/89>

a. Hub Kami

Tampilan sub menu hubungi kami pada website resmi, bagian atas halaman ditampilkan informasi kontak instansi yang terdiri dari alamat kantor, nomor telepon, dan email. Informasi ini disediakan agar masyarakat dapat menghubungi pihak dinas secara langsung apabila membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan keluhan. Di bawah informasi kontak terdapat form pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk mengirimkan laporan secara online. Form ini berisi beberapa kolom yang harus diisi, seperti nama, email, unggah screenshot atau gambar bukti, serta pengaduan.

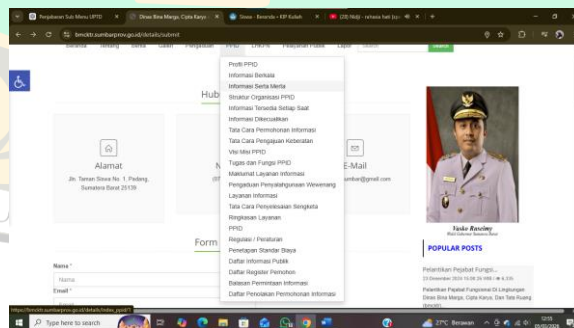
b. Pengaduan Online

Tampilan sub menu pengaduan online yang dibuat menggunakan layanan Google Forms dan digunakan oleh dinas sebagai sarana penyampaian

laporan dari masyarakat. Berisi penjelasan mengenai tujuan formulir tersebut. Selain itu, pihak dinas juga menyampaikan bahwa identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya dan informasi yang diberikan akan dihargai sebagai bahan laporan.

6. Menu “PPID”

Tampilan menu “PPID” yang tersedia di website resmi tersedia submenu dalam bentuk *dropdown* yang berisi banyak kategori informasi, seperti Profil PPID, Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Struktur Organisasi PPID, Informasi Tersedia Setiap Saat, Informasi Dikecualikan, Tata Cara Permohonan Informasi, Tata Cara Pengajuan Keberatan, Visi Misi PPID, Tugas dan Fungsi PPID, serta Maklumat Layanan Informasi, Layanan Informasi, Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang, Ringkasan Layanan, PPID, Tata Cara Penyelesaian Sengketa, Regulasi atau Peraturan, Penetapan Standar Biaya, Daftar Informasi Publik, Daftar Register Pemohon, Balasan Permintaan Informasi, dan Daftar Penolakan Permohonan Informasi.



Gambar 4. 6 Tampilan Menu “PPID”

Sumber: <https://bmcktr.sumbarprov.go.id/details/pages/89>

a. Profil PPID

Tampilan sub menu Profil PPID yang tersedia di website resmi berisi informasi mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

yang bertugas mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, serta menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Dengan adanya PPID, masyarakat yang ingin memperoleh informasi dari instansi pemerintah dapat mengajukan permohonan informasi secara lebih mudah, transparan, dan terorganisir melalui satu pintu pelayanan.

b. Informasi Berkala

Tampilan sub menu informasi berkala yang tersedia di website resmi ini berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara berkala sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik. Pada halaman tersebut disajikan sebuah tabel daftar dokumen informasi publik yang disusun secara sistematis. Dimana terdiri dari beberapa kolom, yaitu Nomor, Nama Instansi, Judul Dokumen, Tahun, dan File. Setiap dokumen juga dilengkapi dengan informasi tahun penerbitan, yaitu tahun 2025. Pada bagian kolom File, terdapat tombol “*Download*” yang memungkinkan pengguna atau masyarakat untuk mengunduh dokumen tersebut secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa website tersebut tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga menyediakan akses dokumen resmi secara terbuka.

c. Informasi Serta Merta

Tampilan sub menu informasi serta merta yang tersedia di website resmi tersebut berfungsi untuk menampilkan informasi publik yang wajib diumumkan secara segera tanpa menunggu permintaan dari masyarakat. Namun pada gambar terlihat keterangan “*No data available in table*”, yang

berarti belum ada informasi serta merta yang dipublikasikan atau data belum diinput ke dalam sistem.

d. Struktur Organisasi PPID

Tampilan sub menu ini menunjukkan susunan organisasi PPID Pelaksana (PPID-P) yang disusun secara bertingkat dari atas ke bawah. Di bagian paling atas terdapat posisi yang berfungsi sebagai penanggung jawab utama, yaitu pihak yang mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan keterbukaan informasi berjalan dengan baik. Di mulai ada ketua yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan layanan informasi publik agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian terdapat sekretaris yang membantu dalam urusan administrasi, pencatatan, serta pengelolaan dokumen dan kegiatan internal. Juga ada bidang pertama, kedua dan ketiga sesuai dengan tupoksi tugas masing-masing. Secara keseluruhan, struktur ini menunjukkan pembagian tugas yang jelas agar pengelolaan informasi publik dapat berjalan tertib, terarah, dan transparan.

e. Informasi Tersedia Setiap Saat

Halaman ini menampilkan sub menu informasi tersedia setiap Saat. Bagian ini berisi daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan dimanapun. Tampilannya berbentuk tabel dengan beberapa kolom, yaitu nomor urut, nama instansi, judul dokumen, tahun, dan tombol unduh. Setiap baris memuat dokumen resmi yang sudah dipublikasikan, lengkap dengan tahun penerbitannya serta tombol Download untuk mengunduh file secara langsung. Secara umum, halaman ini berfungsi sebagai pusat arsip dokumen publik yang selalu tersedia, sehingga masyarakat dapat

dengan mudah memperoleh informasi resmi yang dibutuhkan secara cepat dan transparan.

f. Informasi Dikecualikan

Tampilan sub menu informasi yang dikecualikan yang tersedia di website resmi berisi daftar informasi publik yang tidak dapat dibuka secara umum karena termasuk kategori yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tampilannya berbentuk tabel yang memuat kolom nomor, nama instansi, judul dokumen, tahun, dan tombol unduh. Pada halaman tersebut terlihat satu dokumen yang terdaftar, yaitu daftar informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan untuk tahun tertentu. Meskipun termasuk informasi yang dikecualikan, tetap tersedia dokumen resmi yang menjelaskan daftar atau klasifikasinya, sehingga masyarakat dapat mengetahui jenis informasi apa saja yang tidak dapat diakses.

g. Tata Cara Permohonan Informasi

Tampilan sub menu tata cara permohonan informasi yang tersedia di website resmi ini berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik kepada instansi. Terdapat penjelasan singkat yang menerangkan bahwa masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi kepada PPID dengan mengikuti beberapa langkah yang telah ditentukan. Secara keseluruhan, halaman ini menunjukkan bahwa website dinas dimanfaatkan sebagai media pelayanan informasi publik yang memberikan panduan jelas kepada masyarakat mengenai prosedur permohonan informasi, sehingga mendukung prinsip transparansi,

akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

h. Tata Cara Pengajuan Keberatan

Tampilan sub menu tata cara pengajuan keberatan yang tersedia di website resmi ini berisi informasi mengenai prosedur yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila tidak puas terhadap pelayanan atau tanggapan atas permohonan informasi publik yang telah diajukan sebelumnya. Berisi mengenai jangka waktu pengajuan keberatan yang harus diperhatikan oleh pemohon informasi. Selanjutnya, halaman tersebut memuat beberapa tahapan dalam proses pengajuan keberatan. Secara keseluruhan, halaman ini menunjukkan bahwa website dimanfaatkan sebagai media informasi publik yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengajuan keberatan.

i. Visi Misi PPID

Tampilan sub menu visi misi ppid pada website resmi yang berkaitan dengan PPID berisi penjelasan mengenai arah, tujuan, serta komitmen PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa website dimanfaatkan sebagai media penyampaian informasi mengenai visi dan misi PPID sebagai landasan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Informasi ini penting untuk memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi publik

j. Tugas dan Fungsi PPID

Tampilan sub menu tugas dan fungsi ppid yang tersedia di website resmi yang berkaitan dengan layanan PPID berisi penjelasan mengenai peran,

tugas, serta fungsi PPID Pembantu dalam mengelola dan menyediakan informasi publik di lingkungan organisasi perangkat daerah. Halaman tersebut menjelaskan beberapa tugas dan fungsi utama PPID Pembantu serta menjelaskan pengertian informasi, yaitu keterangan, pernyataan, gagasan, atau tanda yang mengandung nilai dan makna yang dapat disajikan dalam berbagai format melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu dijelaskan juga mengenai informasi publik, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara serta kepentingan masyarakat.

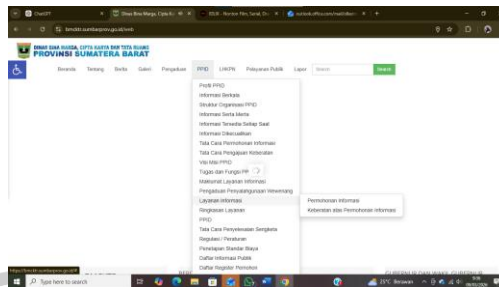
k. Maklumat Layanan Informasi

Tampilan sub menu maklumat layanan informasi yang tersedia di website resmi, dimana pada bagian utama halaman terlihat desain latar berwarna biru dengan ornamen dekoratif berwarna emas di sisi kiri dan kanan yang memberikan kesan resmi dan formal. Di bagian atas terdapat logo Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta identitas instansi BMCKTR (Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat). Secara keseluruhan, tampilan submenu ini dirancang untuk menyampaikan komitmen pelayanan informasi publik secara jelas, sekaligus tetap menyediakan navigasi tambahan bagi pengguna untuk mengakses menu lain.

l. Layanan Informasi

Pada tampilan sub menu layanan informasi yang terdapat di dalam menu PPID yang tersedia di website, menyediakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan informasi publik secara langsung melalui website. Menu ini merupakan bagian dari fasilitas yang disediakan oleh PPID untuk

mempermudah masyarakat dalam mengajukan permintaan informasi serta menyampaikan keberatan terkait pelayanan informasi.



Gambar 4. 7 Tampilan SubMenu Layanan Informasi

Sumber: <https://bmcktr.sumbarprov.go.id/details/pages/89>

Pada sub menu Layanan Informasi, akan muncul dua pilihan layanan yaitu Permohonan Informasi dan Keberatan atas Permohonan Informasi. Dengan adanya menu Layanan Informasi, website ini berfungsi sebagai media pelayanan publik berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta berinteraksi dengan instansi pemerintah secara lebih cepat, transparan, dan efisien.

a) Permohonan Informasi

Tampilan Permohonan Informasi merupakan bagian dari menu Layanan Informasi pada website resmi, berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengajukan permintaan informasi publik secara resmi melalui sistem yang tersedia pada website. Pada bagian atas halaman ditampilkan judul “Permohonan Informasi” dengan sub judul “Submit Permohonan Informasi” yang menunjukkan bahwa pengguna dapat mengajukan permohonan informasi melalui fitur tersebut. Di bawah judul tersebut terdapat bagian Tata Cara Permohonan Informasi yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengguna dalam mengajukan permintaan informasi.

b) Keberatan atas Permohonan Informasi

Halaman Keberatan atas Permohonan Informasi merupakan bagian dari menu Layanan Informasi pada website dinas, sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan apabila permohonan informasi yang sebelumnya diajukan tidak mendapatkan tanggapan, ditolak, atau tidak sesuai dengan informasi yang diminta.

Terdapat bagian Tata Cara Keberatan atas Permohonan Informasi yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengguna dalam mengajukan keberatan. Secara keseluruhan, halaman Keberatan atas Permohonan Informasi ini dirancang untuk memberikan mekanisme bagi masyarakat dalam menyampaikan keberatan terhadap pelayanan informasi publik sehingga tercipta transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi di lingkungan instansi pemerintah.

m. Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang

Halaman “Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang” pada website dinas menampilkan informasi mengenai prosedur penyampaian pengaduan oleh masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan instansi. Informasi ini disajikan dalam bentuk infografis yang memudahkan pengguna untuk memahami tahapan proses pengaduan secara visual dan sistematis. Proses ini bertujuan untuk melakukan verifikasi serta menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh pelapor. Secara keseluruhan, halaman ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme penyampaian dan penanganan pengaduan

sehingga proses pelaporan dapat dilakukan secara jelas, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

n. PPID

a) DPA PPID

Pada halaman ini ditampilkan informasi mengenai DPA PPID yang dipublikasikan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, tercantum judul halaman, nama penulis, serta tanggal dan waktu publikasi. Konten utama menampilkan dokumen resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk pratinjau file, yang memuat rincian seperti nomor DPA, urusan pemerintahan, program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta rincian belanja daerah lengkap dengan kode rekening dan jumlah anggaran.

b) Daftar Informasi Publik

Halaman Daftar Informasi Publik (DIP) pada website Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menampilkan dokumen yang berisi daftar informasi yang tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Halaman ini merupakan bagian dari layanan informasi yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan transparansi terhadap informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Pada halaman tersebut ditampilkan dokumen resmi dalam bentuk file yang dapat dibaca langsung melalui tampilan dokumen pada

website. Dokumen ini memuat beberapa bagian penting seperti bagian menimbang dan mengingat yang menjelaskan dasar pertimbangan serta landasan hukum dalam penyusunan Daftar Informasi Publik. Beberapa dasar hukum yang dicantumkan antara lain Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada badan publik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

c) Rencana Kerja Strategis

Sub menu rencana kerja strategis badan publik pada website dinas menyajikan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan instansi. Halaman ini memuat dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang berisi arah kebijakan, visi, misi, tujuan, serta strategi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh dinas dalam jangka waktu tertentu. Penyediaan dokumen rencana strategis ini juga berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, di mana masyarakat dapat mengakses dan memahami program kerja pemerintah daerah secara lebih mudah.

d) Rapat Koordinasi PPID

Dalam menu layanan informasi publik tersebut, bagian Rapat koordinasi PPID berfungsi sebagai wadah transparansi atas pertemuan-pertemuan strategis yang dilakukan oleh PPID.



Gambar 4. 8 Tampilan SubMenu Rapat Koordinasi PPID

Sumber: <https://bmcktr.sumbarprov.go.id/details/pages/89>

Sub menu ini terbagi menjadi tiga bagian utama berdasarkan periode laporan atau waktu pelaksanaan, yaitu:

1. Rapat PPID Triwulan 1: bagian ini mencakup laporan atau notulensi hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan pada periode 3 bulan pertama (Januari-Maret)
2. Rapat PPID Triwulan 2: bagian ini memuat dokumentasi kegiatan koordinasi yang dilakukan pada periode 3 bulan kedua (April-Juni)
3. Rapat PPID Triwulan 3: bagian ini menyajikan data atau hasil evaluasi rapat yang berlangsung pada periode 3 bulan ketiga (Juli-September)

Secara keseluruhan, struktur ini menunjukkan upaya instansi dalam melakukan monitoring evaluasi rutin terhadap pengelolaan informasi publik, yang kemudian diarsipkan secara sistematis agar dapat diakses oleh masyarakat melalui website resmi tersebut.

e) Standar Operasional Prosedur

Tampilan SOP pada website dinas menyajikan kerangka kerja formal yang mengatur seluruh siklus pengelolaan informasi publik secara sistematis. Dalam satu kesatuan narasi, dokumen-dokumen ini

mencerminkan kesiapan instansi dalam menjalankan amanat keterbukaan informasi, dimulai dari SOP Pendokumentasian, Penetapan, dan Pengelolaan yang menjamin bahwa setiap data internal dikumpulkan dan diorganisir dengan standar yang baku. Rangkaian prosedur ini ditutup dengan mekanisme pelayanan langsung melalui SOP Pengumuman dan SOP Permintaan, yang mengatur tata cara penyebarluasan informasi secara proaktif serta teknis pelayanan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan data secara resmi.

f) Laporan Layanan Informasi Publik

Halaman Laporan Layanan Informasi Publik pada website dinas menampilkan dokumen utama berupa Laporan Tahunan PPID-P Tahun 2024. Penyajian laporan ini secara digital di portal resmi menunjukkan adanya transparansi publik yang memudahkan warga untuk mengunduh dan mempelajari hasil capaian kinerja dinas dalam mengelola hak masyarakat atas informasi.

g) MoU

Halaman website dinas menampilkan informasi mengenai Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga *Memorandum of Understanding* (MoU). Pada halaman ini ditampilkan beberapa dokumen kerja sama, di antaranya dokumen MoU Pemerintah Provinsi, Nota Kesepahaman, serta Perjanjian Kerja yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kerja sama antara instansi pemerintah dan pihak ketiga. Setiap dokumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun secara umum bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak,

ruang lingkup kerja sama, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

h) Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik

Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk tanggung jawab badan publik dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh dinas sebagai bagian dari kewajiban badan publik untuk melaporkan pelaksanaan layanan informasi yang telah dilakukan selama satu tahun.

Melalui penyampaian laporan layanan informasi publik ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat terus ditingkatkan. Dengan adanya laporan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana badan publik menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan partisipatif di Provinsi Sumatera Barat.

i) Laporan Keuangan

Halaman website resmi dinas menampilkan informasi mengenai Laporan Keuangan Tahun 2024. Laporan ini merupakan dokumen penting yang berisi informasi mengenai pengelolaan keuangan dinas selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun secara sistematis dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban

atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, publikasi laporan keuangan melalui website resmi juga merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi publik. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

j) Laporan Kinerja Badan Publik

Halaman website resmi dinas menampilkan dokumen Laporan Kinerja Badan Publik Tahun 2024 yang dikenal dengan LKjIP BMCKTR 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai capaian kinerja suatu instansi pemerintah selama satu tahun anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam laporan tersebut dijelaskan berbagai program, kegiatan, serta hasil yang telah dicapai oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2024. Selain itu, laporan ini juga memuat evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Dengan adanya laporan kinerja badan publik tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

k) DPA

Sub menu “DPA” pada halaman website resmi menampilkan informasi mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025. Halaman ini berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi publik yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada instansi tersebut. Dokumen ini merupakan bagian dari DPA yang berisi ringkasan atau rekapitulasi belanja anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat selama tahun anggaran 2025.

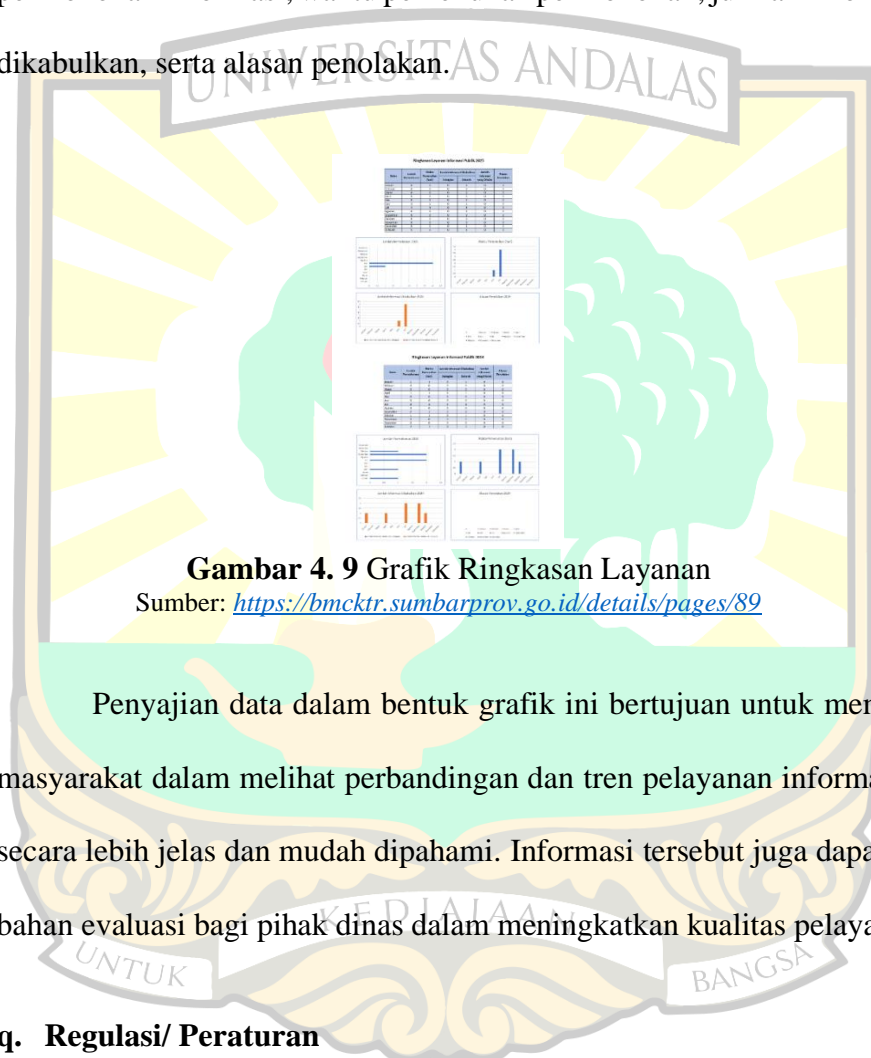
o. Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Pada sub menu tata cara penyelesaian sengketa yang tersedia pada website resmi, dimulai dari tahap pengajuan sengketa oleh pemohon informasi publik kepada Komisi Informasi hingga selesai. Informasi yang disajikan mencakup alur penyelesaian sengketa, persyaratan yang harus dipenuhi, tahapan mediasi dan/atau ajudikasi, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Selain itu, sub menu ini juga dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti formulir pengajuan sengketa, contoh putusan, serta informasi waktu penyelesaian perkara, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan transparan kepada masyarakat.

p. Ringkasan Layanan

Sub menu ringkasan layanan pada website dinas menyajikan informasi mengenai rekapitulasi pelayanan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Pada halaman tersebut ditampilkan tabel ringkasan layanan informasi publik

yang memuat beberapa indikator, seperti jumlah permohonan informasi setiap bulan, waktu pemenuhan permohonan, jumlah informasi yang dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah informasi yang ditolak, serta alasan penolakan permohonan informasi. Selain dalam bentuk tabel, informasi juga ditampilkan dalam bentuk grafik visualisasi data, seperti grafik jumlah permohonan informasi, waktu pemenuhan permohonan, jumlah informasi yang dikabulkan, serta alasan penolakan.



Gambar 4. 9 Grafik Ringkasan Layanan

Sumber: <https://bmcktr.sumbarprov.go.id/details/pages/89>

Penyajian data dalam bentuk grafik ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melihat perbandingan dan tren pelayanan informasi publik secara lebih jelas dan mudah dipahami. Informasi tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak dinas dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

q. Regulasi/ Peraturan

Sub menu regulasi atau peraturan pelayanan informasi publik pada website dinas menyajikan berbagai dokumen peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan dinas tersebut. Halaman ini memuat kumpulan dokumen resmi yang berkaitan

dengan ketentuan, kebijakan, serta keputusan yang mengatur pengelolaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Pada halaman ini ditampilkan beberapa dokumen penting, seperti Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi (PERKI), Peraturan Daerah, serta standar layanan informasi publik yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, terdapat pula dokumen mengenai daftar informasi publik yang berfungsi sebagai acuan dalam pengelolaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya informasi ini, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban dalam memperoleh informasi serta mengetahui prosedur yang berlaku dalam permohonan informasi di lingkungan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

r. Penetapan Standar Biaya

Sub menu standar biaya perolehan informasi publik pada website resmi, berisi informasi mengenai ketentuan biaya yang berlaku bagi masyarakat dalam memperoleh salinan informasi publik. Halaman ini menjadi salah satu bentuk transparansi instansi pemerintah dalam memberikan kejelasan terkait prosedur dan biaya yang mungkin timbul dalam proses permohonan informasi

Pada halaman tersebut dijelaskan bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dapat menyediakan informasi publik kepada masyarakat secara gratis. Namun demikian, apabila pemohon membutuhkan salinan dokumen dalam bentuk penggandaan atau fotokopi, maka biaya yang

timbul dari proses penggandaan tersebut menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa biaya yang dikenakan bukanlah biaya untuk memperoleh informasi, melainkan hanya biaya operasional untuk proses penggandaan dokumen.

s. Daftar Informasi Publik

Sub menu daftar informasi publik pada website dinas menyajikan dokumen resmi yang memuat daftar informasi yang tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Halaman ini merupakan bagian dari implementasi keterbukaan informasi publik yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait kegiatan, kebijakan, maupun layanan yang dimiliki oleh instansi tersebut.

Pada halaman ini ditampilkan dokumen resmi berupa Keputusan Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pemutakhiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Dokumen tersebut berisi informasi mengenai jenis-jenis informasi publik yang dikelola oleh dinas serta klasifikasi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

t. Daftar Register Pemohon

Sub menu daftar register pemohon pada website resmi menampilkan data terkait daftar permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat kepada instansi tersebut. Dokumen tersebut berisi tabel yang memuat berbagai informasi terkait permohonan informasi, seperti nomor

register, tanggal permohonan, identitas pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, tujuan penggunaan informasi, serta status atau keputusan permohonan informasi tersebut. Selain itu, tabel juga mencantumkan keterangan mengenai bentuk informasi yang diberikan, apakah dalam bentuk salinan dokumen, melihat langsung, atau bentuk lainnya.

u. Balasan Permintaan Informasi

Sub menu balasan permintaan informasi pada halaman website resmi menampilkan kumpulan dokumen yang berisi surat balasan resmi terhadap permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat. Halaman ini disusun dalam bentuk daftar dokumen yang dapat diunduh, sehingga masyarakat dapat melihat contoh atau arsip tanggapan yang telah diberikan oleh pihak instansi terhadap permintaan informasi yang masuk.

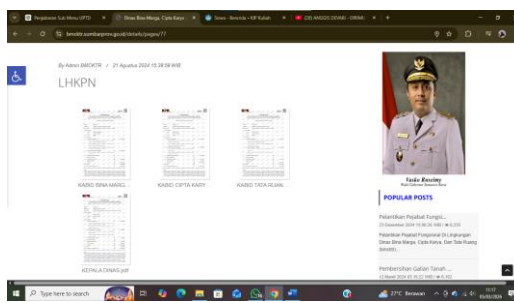
Dokumen-dokumen yang ditampilkan pada submenu ini pada umumnya berisi tanggapan resmi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap permintaan informasi publik. Isi surat balasan biasanya mencakup penjelasan mengenai informasi yang diminta, keputusan apakah informasi tersebut dapat diberikan atau tidak, serta keterangan tambahan terkait prosedur atau ketentuan yang berlaku dalam pelayanan informasi publik. Keberadaan submenu Balasan Permintaan Informasi ini merupakan bagian dari upaya penerapan keterbukaan informasi publik, di mana instansi pemerintah menyediakan dokumentasi tanggapan permohonan informasi secara terbuka.

v. Daftar Penolakan Permohonan Informasi

Sub menu pada halaman daftar penolakan permohonan informasi publik menampilkan sebuah tabel yang berfungsi untuk mencatat dan mendokumentasikan setiap permohonan informasi publik yang ditolak oleh PPID pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat. Tabel ini disusun secara sistematis agar setiap proses permohonan informasi dapat dipantau secara transparan dan terdokumentasi dengan baik. Terdapat beberapa kolom yang menjelaskan informasi penting terkait permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Secara keseluruhan, sub menu ini berfungsi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan permohonan informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui alasan serta proses yang terjadi apabila suatu permohonan informasi tidak dapat dipenuhi oleh badan publik.

7. Menu “LKPHN”

Halaman website dinas menampilkan informasi mengenai menu “Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)”. Laporan ini merupakan bentuk kewajiban bagi para pejabat negara untuk melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Gambar 4. 10 Tampilan Menu “LKPHN”

Sumber: <https://bmcktr.sumbarprov.go.id/details/pages/89>

Pada halaman tersebut ditampilkan beberapa dokumen LHKPN dari pejabat di lingkungan dinas, di antaranya laporan dari Kepala Bidang dan laporan dari Kepala Dinas. Setiap dokumen berisi rincian mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan dan telah dilaporkan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian dan publikasi LHKPN ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaporan LHKPN dikelola dan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang bertugas untuk mendorong transparansi dan integritas para penyelenggara negara. Dengan adanya kewajiban pelaporan ini, diharapkan para pejabat publik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, transparan, dan berintegritas demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

8. Menu “Pelayanan Publik”

Halaman beranda pada website dinas menyediakan akses terpadu melalui menu “Pelayanan Publik” yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan serta informasi teknis. Menu ini mencakup berbagai instrumen layanan seperti ketersediaan Sarana dan Prasarana, pedoman keselamatan melalui *Prosedur Emergency*, serta landasan hukum operasional yang tertuang dalam SOP dan SK Pelayanan Publik. Selain itu, portal ini mengintegrasikan berbagai sistem aplikasi khusus seperti Sipenjal, dan SI-BADUNG yang mendukung digitalisasi pelayanan sektoral, yang semuanya diperkuat dengan komitmen instansi melalui Visi Misi Moto, Jadwal Informasi Publik, serta Maklumat Pelayanan Publik. Keberadaan struktur menu yang komprehensif ini mencerminkan upaya dinas dalam menghadirkan pelayanan

semuanya terintegrasi dalam satu sistem Layanan Informasi dan Fasilitas untuk memastikan standar pelayanan prima bagi masyarakat. Pada sub menu Sarana dan Prasarana pada website, yang disusun untuk memberikan gambaran fungsional dari masing-masing fasilitas:

1. Layanan Informasi dan Fasilitas: Merupakan pintu gerbang utama yang menyajikan panduan visual (biasanya berupa video atau galeri) mengenai seluruh infrastruktur pelayanan yang ada di kantor dinas untuk memudahkan pengunjung mengenali tata letak kantor.
2. Ruang Laktasi: Fasilitas privasi yang disediakan khusus bagi ibu menyusui untuk memberikan ASI atau memerah ASI dengan nyaman, aman, dan higienis saat sedang berada di area kantor.
3. Layanan Disabilitas: Komitmen terhadap inklusivitas yang mencakup penyediaan sarana fisik seperti jalur pemandu (*guiding block*), ram atau bidang miring untuk kursi roda, serta bantuan petugas khusus bagi penyandang disabilitas.
4. Ruang Tunggu: Area yang dirancang dengan kursi yang memadai dan pendingin ruangan untuk memastikan kenyamanan masyarakat saat mengantre atau menunggu proses administrasi pelayanan publik.
5. Pojok Baca: Area literasi yang menyediakan berbagai bahan bacaan, baik majalah, koran, maupun buku-buku teknis, guna meminimalisir kejenuhan pengunjung selama menunggu layanan.
6. Layanan Digital: Fasilitas komputer atau terminal mandiri yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan surat-menyurat atau perizinan secara daring langsung dari lokasi kantor.

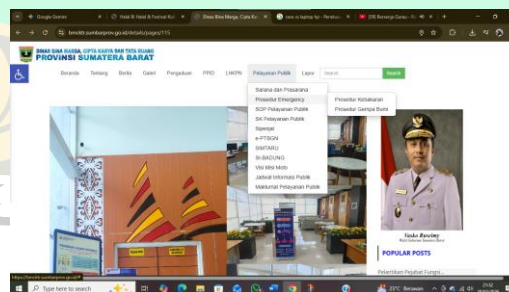
7. Wifi Corner: Area khusus yang dilengkapi dengan akses internet nirkabel gratis berkecepatan tinggi untuk mendukung kebutuhan digital pengunjung saat mengakses informasi publik.
8. Tempat Ibadah: Ketersediaan musala yang bersih dan terawat, lengkap dengan sarana wudu, guna memudahkan pengunjung maupun pegawai melaksanakan ibadah tepat waktu.
9. Buku Tamu Digital: Sistem registrasi pengunjung berbasis perangkat tablet atau komputer untuk mendata setiap tamu yang datang secara lebih akurat, cepat, dan ramah lingkungan (*paperless*).
10. Videotron: Layar digital besar yang ditempatkan di area strategis untuk menampilkan pengumuman penting, capaian kinerja dinas, hingga video sosialisasi program pemerintah.
11. Apar (Alat Pemadam Api Ringan): Perangkat keamanan standar yang diletakkan di berbagai titik strategis gedung sebagai langkah mitigasi dan proteksi dini terhadap bahaya kebakaran.
12. Lapangan Indoor dan Outdoor: Fasilitas olahraga atau area terbuka yang dapat digunakan untuk kegiatan senam bersama, upacara, maupun acara - acara dinas lainnya yang melibatkan banyak peserta.
13. Pojok Bermain Anak: Area yang dilengkapi dengan mainan edukatif dan lantai yang aman agar pengunjung yang membawa anak kecil tetap dapat mengurus keperluan dengan tenang sementara anak-anak bermain.
14. Parkiran: Area parkir yang luas dan teratur untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, dilengkapi dengan petugas keamanan untuk menjamin keselamatan kendaraan pengunjung.

15. Papan Pengumuman: Media informasi konvensional yang memuat surat edaran, daftar prosedur, hingga pengumuman hasil seleksi atau kegiatan yang perlu diketahui khalayak umum.
16. Aula: Ruangan pertemuan besar dengan kapasitas luas yang digunakan untuk kegiatan seminar, bimbingan teknis, atau rapat besar lintas instansi.
17. Ruang PPID: Unit pelayanan khusus di mana masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan petugas pengelola informasi untuk mengajukan permohonan data secara resmi.

Seluruh fasilitas ini menunjukkan dedikasi instansi dalam memberikan pelayanan yang manusiawi, modern, dan sesuai dengan standar pelayanan publik nasional.

b. Prosedur Emergency

Berdasarkan struktur navigasi yang terlihat pada website resmi, sub menu prosedur emergency disusun sebagai bagian dari standar keselamatan gedung bagi seluruh pengunjung dan pegawai.



Gambar 4. 13 Tampilan SubMenu Prosedur Emergency

Sumber: <https://bmcktr.sumbarprov.go.id/details/pages/89>

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keamanan publik, menu ini menyajikan protokol evakuasi dan tindakan penyelamatan diri jika terjadi bencana di area kantor. Sub menu ini terbagi menjadi dua kategori utama berdasarkan potensi risiko bencana, yaitu:

1. **Prosedur Kebakaran:** Bagian ini memuat panduan teknis mengenai langkah-langkah yang harus diambil saat terdeteksi api atau asap di dalam gedung. Narasi dalam prosedur ini biasanya mencakup cara penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), instruksi untuk tidak menggunakan lift, hingga alur menuju tangga darurat dan titik kumpul (*assembly point*) yang aman.
2. **Prosedur Gempa Bumi:** Mengingat kondisi geografis wilayah Sumatera Barat, prosedur ini sangat krusial. Di dalamnya terdapat instruksi mengenai tindakan perlindungan diri saat guncangan terjadi, seperti mencari tempat berlindung di bawah meja yang kokoh, menjauh dari kaca, serta tata cara evakuasi keluar gedung secara tertib setelah guncangan mereda untuk menghindari risiko bangunan runtuh.

c. SOP Pelayanan Publik

Berdasarkan informasi yang tersedia pada website resmi, submenu SOP Pelayanan Publik disusun sebagai panduan operasional yang komprehensif untuk memastikan setiap layanan informasi dan teknis berjalan secara transparan dan akuntabel. Di dalamnya, terdapat berbagai dokumen standar yang mengatur alur kerja petugas PPID, mulai dari tahap Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi yang menjamin data publik tersusun dengan rapi dan valid, hingga SOP Penetapan yang menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi setiap informasi yang masuk.

Selain itu, terdapat aspek perlindungan hukum yang sangat kuat melalui SOP Pengujian Konsekuensi, yang secara teknis memandu petugas dalam memilah informasi mana yang dapat dibuka untuk umum dan mana yang harus dikecualikan demi kepentingan keamanan atau rahasia negara. Dari sisi

pelayanan langsung, tersedia pula SOP Pengumuman yang mengatur mekanisme penyebaran data secara proaktif serta SOP Permintaan yang menjabarkan prosedur teknis bagi warga yang ingin mengajukan permohonan informasi secara resmi, baik melalui formulir fisik maupun digital. Keberadaan dokumen-dokumen resmi yang telah disahkan ini mencerminkan komitmen Dinas BMCKTR dalam menghadirkan standar pelayanan minimal yang jelas, terukur, dan bebas dari ketidakpastian administratif.

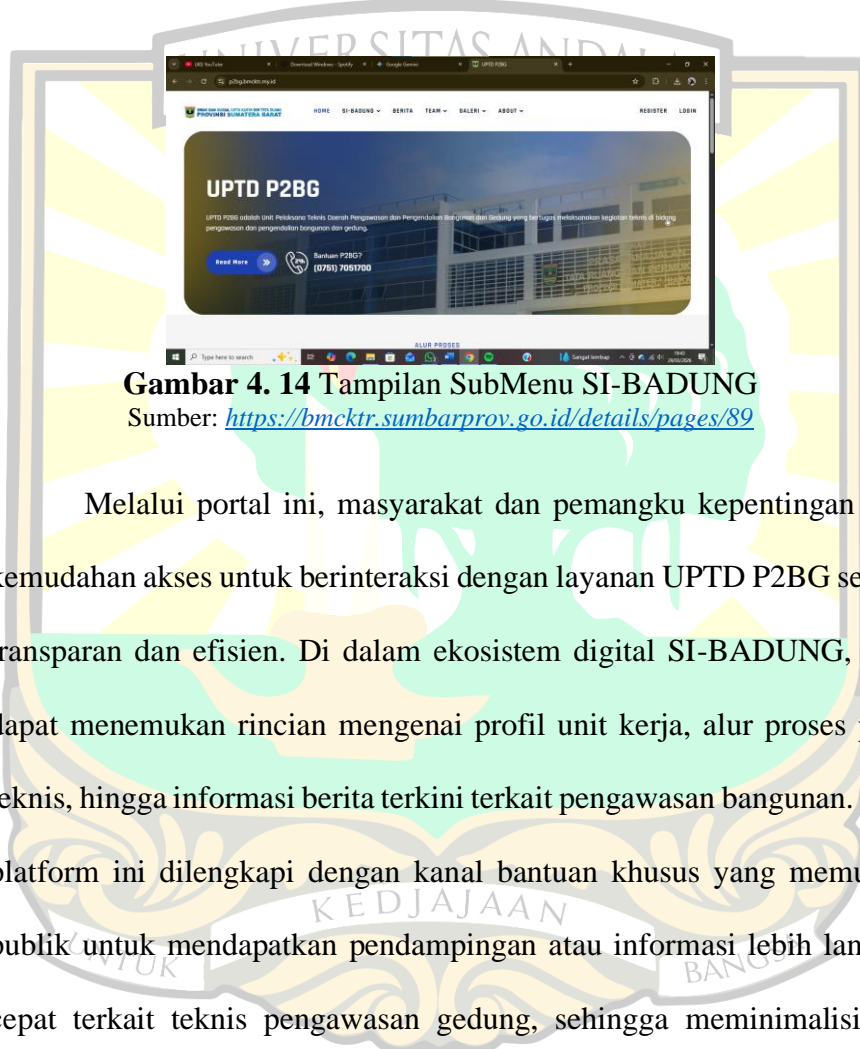
d. SK Pelayanan Publik

Berdasarkan yang terdapat pada website resmi dinas, sub menu SK Pelayanan Publik (Surat Keputusan) disusun sebagai fondasi hukum yang memberikan kekuatan legalitas terhadap setiap interaksi pelayanan antara instansi dan masyarakat. Halaman ini merupakan pusat dokumentasi kebijakan yang mengikat secara hukum, di mana setiap keputusan yang diterbitkan oleh pimpinan dinas dipublikasikan agar dapat diketahui oleh khalayak luas. Keberadaan SK ini memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak bersifat subjektif, melainkan berlandaskan pada aturan birokrasi yang jelas dan terstandarisasi. Terdapat pula surat keputusan mengenai pembentukan Tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang secara resmi menunjuk personel-personel bertanggung jawab dalam mengelola data dan merespons permohonan informasi publik.

e. SI-BADUNG

Berdasarkan informasi yang tersedia pada website resmi dinas, sub menu SI-BADUNG merupakan perwujudan dari transformasi digital yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan dan Pengendalian

Bangunan dan Gedung (UPTD P2BG). Layanan ini dirancang sebagai platform integratif yang mengemban mandat teknis dalam mengawasi serta mengendalikan standar bangunan dan gedung di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran portal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap infrastruktur bangunan yang berdiri telah memenuhi kriteria keamanan, kelaikan teknis, dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.



Gambar 4. 14 Tampilan SubMenu SI-BADUNG
Sumber: <https://bmcktr.sumbarprov.go.id/details/pages/89>

Melalui portal ini, masyarakat dan pemangku kepentingan diberikan kemudahan akses untuk berinteraksi dengan layanan UPTD P2BG secara lebih transparan dan efisien. Di dalam ekosistem digital SI-BADUNG, pengguna dapat menemukan rincian mengenai profil unit kerja, alur proses pelayanan teknis, hingga informasi berita terkini terkait pengawasan bangunan. Selain itu, platform ini dilengkapi dengan kanal bantuan khusus yang memungkinkan publik untuk mendapatkan pendampingan atau informasi lebih lanjut secara cepat terkait teknis pengawasan gedung, sehingga meminimalisir kendala birokrasi dalam proses pengendalian bangunan dan gedung di daerah.

f. Sipenjal

Berdasarkan informasi teknis yang dikelola oleh dinas, SIPENJAL (Sistem Informasi Pelayanan Jalan) merupakan inovasi layanan digital yang dirancang khusus untuk mempermudah akses data infrastruktur jalan dan

g. Visi Misi Moto

Tampilan Visi Misi Moto pada website resmi dinas menyajikan landasan filosofis dan arah strategis instansi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Secara naratif, visi utama yang diusung adalah terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel guna memenuhi hak setiap pemohon informasi sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi ini menjadi komitmen dasar bahwa setiap warga negara memiliki hak yang dijamin untuk mengakses data publik secara terbuka.

h. Jadwal Informasi Publik

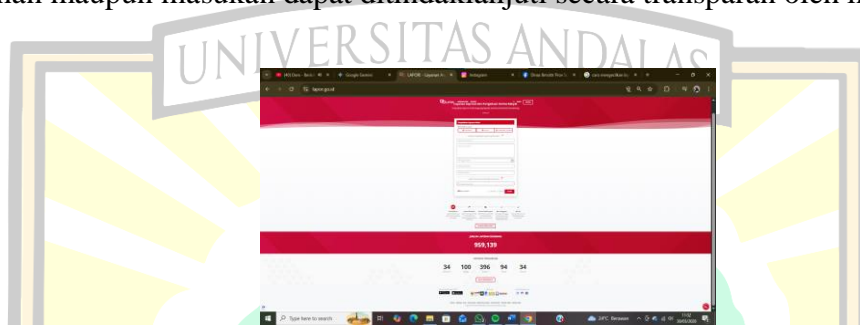
Berdasarkan informasi yang tertera pada dokumen resmi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat, submenu Jadwal Pelayanan Informasi Publik merupakan panduan waktu operasional bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan secara tatap muka maupun administratif.

i. Maklumat Pelayanan Publik

Berdasarkan dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas, sub menu Maklumat Pelayanan Informasi Publik merupakan pernyataan janji layanan yang memiliki kekuatan moral dan hukum bagi instansi dalam melayani masyarakat. Maklumat ini berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi hak-hak pemohon informasi. Di dalamnya tercantum klausul tegas bahwa apabila instansi tidak menepati janji layanan tersebut, pihak dinas menyatakan kesiapannya untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Menu “LAPOR”

Berdasarkan integrasi layanan pada website dinas, menu LAPOR merupakan situs resmi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang terhubung langsung dengan sistem nasional. Fasilitas ini dirancang sebagai jembatan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan setiap keluhan maupun masukan dapat ditindaklanjuti secara transparan oleh instansi.



Gambar 4. 16 Tampilan Menu “LAPOR” Dinas BMCKTR

Sumber: <https://bmcktr.sumbarprov.go.id/details/pages/89>

Di dalam platform ini, masyarakat diberikan kemudahan untuk menyampaikan laporan melalui tiga klasifikasi utama yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.

4.1.2 Mekanisme, Keamanan, dan Frekuensi Pemutakhiran Informasi Publik

Sebagai upaya menjamin keakuratan dan keterbaruan data yang disajikan kepada masyarakat, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menerapkan mekanisme pemutakhiran informasi secara berkala dan berkesinambungan melalui koordinasi antar unit kerja. Frekuensi pembaruan data pada website resmi dilakukan secara ketat berdasarkan klasifikasi sifat informasinya untuk memastikan prinsip transparansi tetap terjaga. Secara detail, frekuensi pemutakhiran tersebut dibagi menjadi tiga kategori utama:

- a. Informasi Berkala, seperti Laporan Keuangan, Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), hingga Laporan Tahunan PPID, pemutakhiran dilakukan setiap satu tahun sekali atau segera setelah dokumen

tersebut disahkan secara legal oleh pejabat berwenang. Hal ini terlihat pada pembaruan dokumen Renstra 2025-2029 dan Spesifikasi Teknis Jasa 2026 yang telah tersedia pada portal PPID sebagai rujukan perencanaan jangka panjang bagi publik.

- b. Informasi Serta-Merta, pemutakhiran dilakukan secara real-time atau seketika saat kejadian berlangsung. Informasi ini mencakup pengumuman darurat, peringatan bencana alam, atau gangguan infrastruktur jalan yang mendesak di wilayah Sumatera Barat. Kecepatan pembaruan pada kategori ini menjadi prioritas utama guna memberikan peringatan dini dan jaminan keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan dan fasilitas publik.
- c. Informasi Tersedia Setiap Saat, seperti SOP Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan profil organisasi, pemutakhiran dilakukan secara dinamis setiap kali terdapat perubahan regulasi atau struktur organisasi. Peninjauan ulang terhadap validitas dokumen ini dilakukan minimal setiap semester untuk memastikan bahwa standar pelayanan yang diakses masyarakat tetap relevan dengan kondisi administratif terbaru.

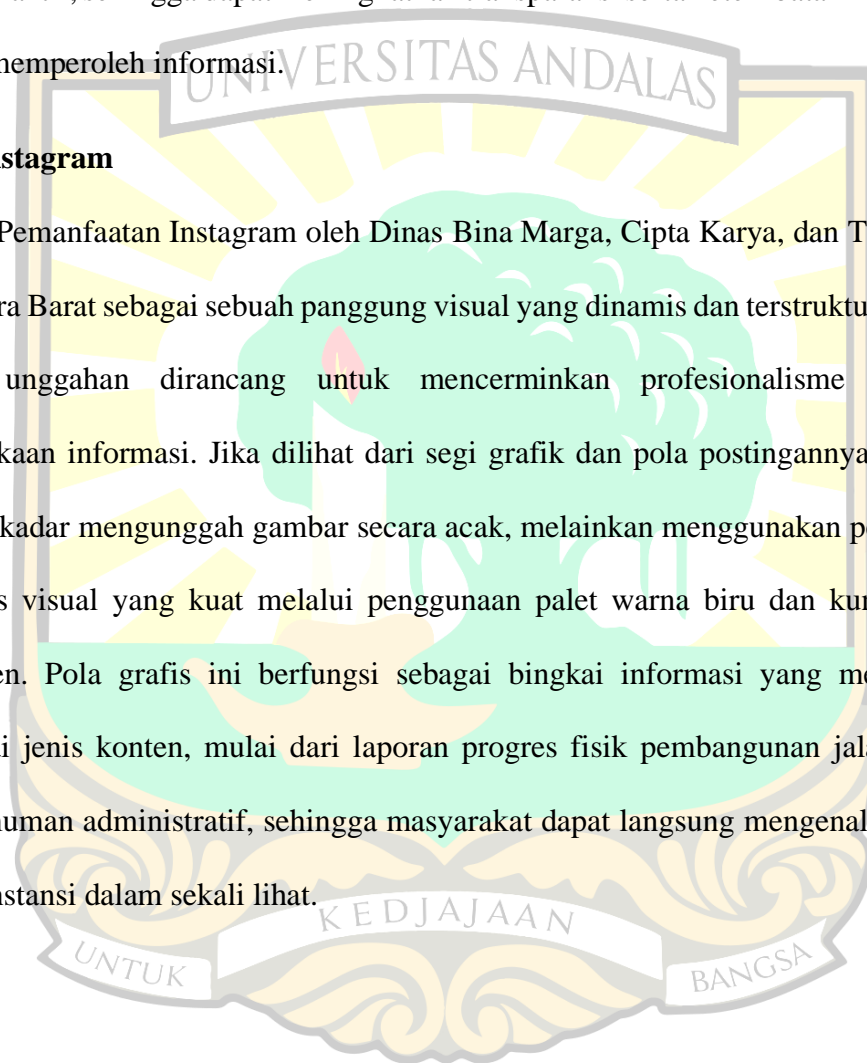
Seluruh proses teknis pemutakhiran ini dijalankan melalui alur koordinasi internal yang ketat, di mana unit kerja Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang bertanggung jawab menyuplai data mentah kepada tim pengelola website di bawah naungan PPID. Sebelum diunggah, setiap konten wajib melalui tahap verifikasi dan validasi untuk memastikan data tersebut akurat dan tidak melanggar ketentuan informasi yang dikecualikan. Dengan adanya jadwal pemeliharaan rutin pada sistem infrastruktur digital, Dinas menjamin seluruh kanal informasi, termasuk aplikasi pendukung seperti SI-BADUNG, dapat diakses oleh publik setiap saat tanpa kendala teknis yang berarti.

4.2 Pemanfaatan Media Sosial dalam Penyebaran Informasi Publik

Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi publik menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi digital. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat, luas, dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan transparansi serta keterlibatan masyarakat dalam memperoleh informasi.

4.2.1 Instagram

Pemanfaatan Instagram oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumatera Barat sebagai sebuah panggung visual yang dinamis dan terstruktur, di mana setiap unggahan dirancang untuk mencerminkan profesionalisme sekaligus keterbukaan informasi. Jika dilihat dari segi grafik dan pola postingannya, akun ini tidak sekadar mengunggah gambar secara acak, melainkan menggunakan pendekatan identitas visual yang kuat melalui penggunaan palet warna biru dan kuning yang konsisten. Pola grafis ini berfungsi sebagai bingkai informasi yang menyatukan berbagai jenis konten, mulai dari laporan progres fisik pembangunan jalan hingga pengumuman administratif, sehingga masyarakat dapat langsung mengenali identitas resmi instansi dalam sekali lihat.





Gambar 4. 17 Tampilan Instagram Dinas BMCKTR

Sumber: <https://www.instagram.com/bmcktr.provsumbar?igsh=MT15NzZnMTQ4cm12dg==>

Pada grafik postingan ini menunjukkan adanya ritme komunikasi yang adaptif terhadap situasi. Grafik aktivitas akun cenderung meningkat terus pada momen-momen krusial yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, seperti periode mudik Lebaran. Hal ini terlihat dari intensitas unggahan mengenai monitoring posko dan informasi jalur transportasi yang disajikan dalam bentuk infografis ringkas. Pola ini membuktikan bahwa Instagram Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Karya Provinsi Sumatera Barat berfungsi sebagai sumber informasi responsif yang mampu mengubah data teknis lapangan menjadi pesan visual yang mudah dikonsumsi oleh kalangan masyarakat di Sumatera Barat. Selain menyampaikan informasi, konten yang dibuat juga berusaha menampilkan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Postingan tidak hanya berisi dokumentasi proyek atau kegiatan teknis, tetapi juga

diselingi dengan konten yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti apresiasi kepada kinerja ASN dan ucapan pada hari besar keagamaan. Pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi kesan kaku pada instansi pemerintah, sehingga terlihat lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat, serta mampu membangun hubungan emosional.



Gambar 4. 18 Postingan Instagram Dinas BMCKTR

Sumber: <https://www.instagram.com/p/DWTQTT2FA-q/?igsh=MW16NnNoNW5yaHNhdQ==>

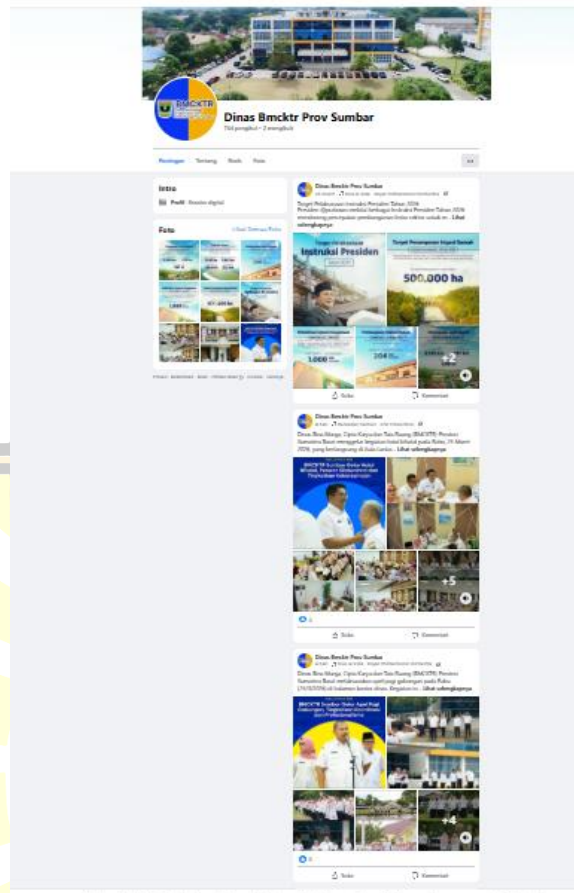
Salah satu unggahan instagram dinas adalah postingan mengenai kegiatan "Halal Bihalal" yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2026. Secara naratif, postingan ini menunjukkan bagaimana instansi memanfaatkan media sosial tidak hanya untuk urusan teknis infrastruktur, tetapi juga untuk membangun citra internal

yang solid dan harmonis di hadapan publik. Dalam unggahan tersebut, terlihat penggunaan elemen grafis yang sangat konsisten dengan identitas visual dinas, yakni penggunaan latar belakang biru dengan teks putih yang tegas dan rapi. Foto utama menampilkan momen interaksi hangat antarpegawai, yang menekankan pada nilai silaturahmi pasca bulan suci Ramadan. Narasi yang dibangun dalam caption postingan tersebut sangat terstruktur, dimulai dengan detail pelaksanaan acara di Aula Lantai 4 Kantor Dinas, hingga kutipan langsung dari Kepala Dinas yaitu Bapak Armizoprades.

Fokus utama dari postingan ini adalah menyampaikan pesan bahwa sinergi internal merupakan fondasi utama bagi kinerja pelayanan publik yang lebih baik. Dengan menyebutkan kehadiran jajaran pimpinan mulai dari Sekretaris Dinas hingga Kepala UPTD Wilayah I-VI, postingan ini secara implisit menunjukkan struktur organisasi yang kompak dan bersatu. Penggunaan tagar strategis seperti #SigapMembangunNegeriUntukRakyat dan #Berakhlak mempertegas bahwa kegiatan seremonial seperti ini tetap dikaitkan dengan semangat profesionalisme dalam menjalankan tugas kedinasan.

4.2.2 Facebook

Media sosial Facebook oleh Dinas Bina Marga Cipta dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sebagai media rekam jejak instansi pemerintah yang bersifat administratif dan informatif. Berbeda dengan platform lain yang mengutamakan kecepatan, Facebook dipilih sebagai sumber untuk menyajikan kedalaman informasi terkait kebijakan strategis pembangunan daerah. Fokus utamanya terletak pada diseminasi regulasi dan transparansi program kerja, dimana setiap unggahan sering kali membedah instruksi pimpinan pusat maupun daerah seperti Instruksi Presiden mengenai infrastruktur dengan rincian data teknis yang lebih padat dan lebih deskriptif.



Gambar 4.19 Tampilan Facebook Dinas BMCKTR

Sumber: <https://www.facebook.com/people/Dinas-Bmcktr-Prov-Sumbar/100092631173558/#>

Secara umum, pola postingan di Facebook menunjukkan adanya bentuk tanggung jawab instansi yang jelas dan terukur kepada masyarakat.. Hal ini terlihat dari penggunaan format album foto yang mendokumentasikan rangkaian kegiatan secara kronologis, mulai dari koordinasi internal, apel pagi gabungan, hingga peninjauan langsung di lokasi proyek. Narasi yang dibangun di sini jauh lebih formal, bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa setiap rupiah anggaran pembangunan dikelola melalui pengawasan ketat dan kerja sama antar bidang yang solid di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

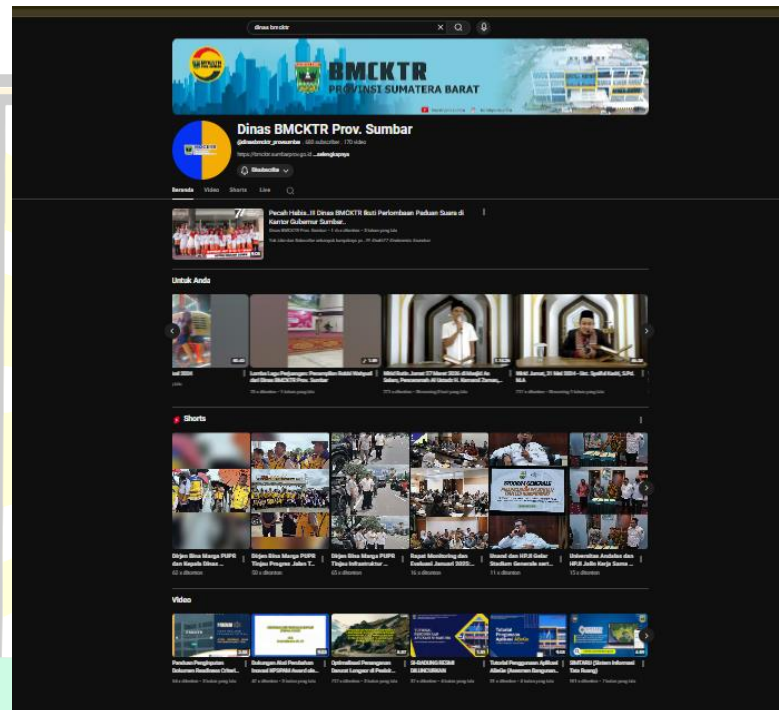
Selain itu, Facebook berfungsi sebagai jembatan komunikasi bagi masyarakat di pelosok daerah. Dengan karakteristik pengguna yang mencakup berbagai kelompok usia dan komunitas lokal, dinas memanfaatkan platform ini untuk menyampaikan

pengumuman penting yang memerlukan penjelasan panjang, seperti prosedur pengaduan sarana prasarana atau detail teknis rehabilitasi fasilitas publik. Melalui pendekatan ini, Facebook BMCKTR tidak hanya berperan sebagai media publikasi, tetapi juga sebagai dokumen publik digital yang memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses informasi yang utuh dan terpercaya.

4.2.3 YouTube

Pemanfaatan YouTube oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumatera Barat dapat dilihat sebagai kumpulan dokumentasi visual yang besar, yang berfungsi untuk menunjukkan dan membuktikan setiap proses pembangunan yang dilakukan di Sumatera Barat. Jika Instagram adalah etalase yang memajang keindahan hasil akhir, maka YouTube menjadi ruang bedah yang memperlihatkan proses, peluh, dan teknis di balik layar. Kanal ini mulai menampakkan denyut aktivitas yang konsisten sejak tahun 2023, menandai pergeseran instansi dari sekadar penyampai pesan singkat menjadi produser konten dokumentasi yang mendalam. Fokus utama dari pola postingan di kanal ini tertuju pada Transparansi Progres dan Edukasi Prosedural. Hal ini terlihat jelas dari bagaimana narasi video dibangun; tidak hanya menampilkan jalan yang sudah mulus, tetapi juga proses pengaspalan, peninjauan lapangan oleh pejabat teknis, hingga penggunaan teknologi pemetaan udara. Fokus ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan percaya kepada masyarakat bahwa anggaran daerah dikelola secara nyata dan terukur. YouTube dipilih sebagai wadah karena durasinya yang panjang memungkinkan dinas untuk menjelaskan detail-detail teknis yang tidak mungkin tertampung dalam caption singkat di platform lain. Selain fokus pada fisik bangunan, narasi yang dibangun juga mengarah pada Digitalisasi Layanan Publik. Melalui unggahan berupa video tutorial dan panduan penggunaan aplikasi internal, fokus YouTube Dinas BMCKTR bergeser menjadi pusat bantuan

mandiri (*self-service center*) bagi warga atau mitra kerja yang membutuhkan bimbingan teknis. Dengan kata lain, kanal ini tidak hanya ingin "dilihat" kinerjanya, tetapi juga ingin "digunakan" manfaatnya sebagai referensi digital yang valid bagi siapa saja yang bersinggungan dengan urusan bina marga, cipta karya, dan tata ruang di Sumatera Barat.



Gambar 4. 20 Tampilan Youtube Dinas BMCKTR

Sumber: https://www.youtube.com/@dinasbmcktr_provsumbar

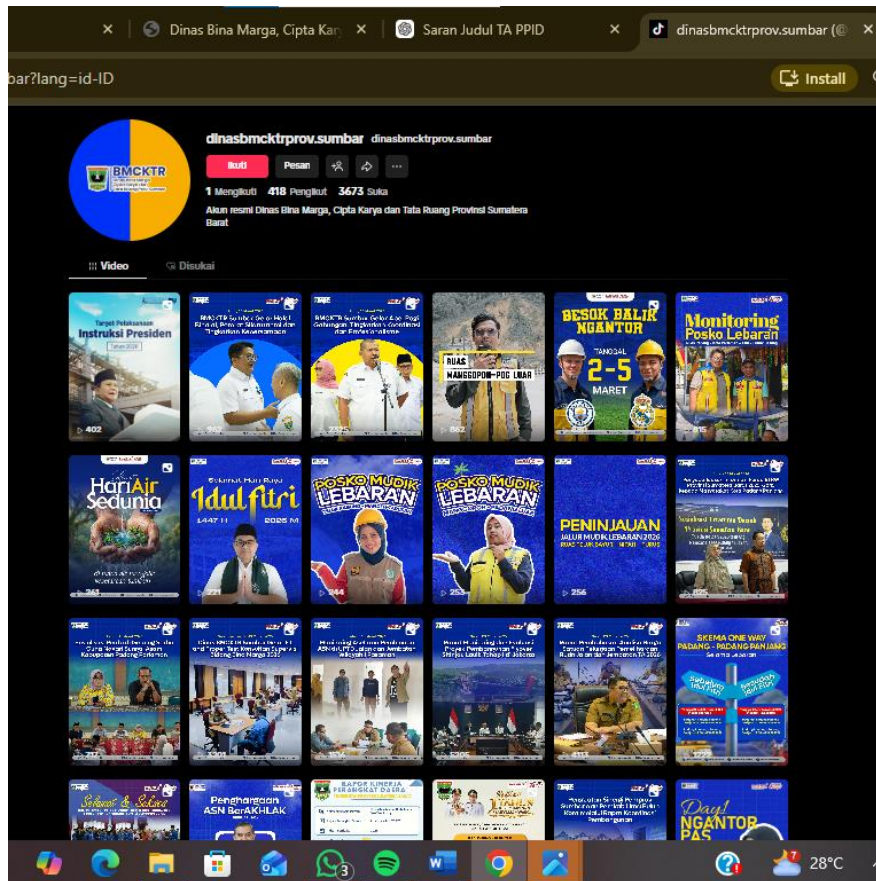
4.2.4 TikTok

Berdasarkan visualisasi pada kanal YouTube dan TikTok Dinas BMCKTR Sumatera Barat, pemanfaatan kedua platform ini dapat dinarasikan sebagai strategi komunikasi audio-visual yang adaptif dan edukatif untuk menjangkau audiens digital yang lebih luas. Platform YouTube dioptimalkan sebagai arsip dokumentasi strategis dan pusat rujukan teknis. Jika meninjau pola postingannya, dinas membagi konten ke dalam tiga kategori besar: video durasi panjang, Live streaming, dan Shorts. Video durasi panjang difokuskan pada laporan progres pembangunan infrastruktur dan dokumentasi kegiatan resmi yang membutuhkan detail mendalam. Selain itu, terdapat

aspek edukasi yang kuat melalui video tutorial penggunaan aplikasi internal, seperti sistem informasi jalan atau panduan administrasi lainnya. Pemanfaatan fitur Shorts pada YouTube terlihat mengikuti tren konsumsi konten cepat, di mana potongan-potongan video aksi sigap di lapangan atau peninjauan proyek disajikan secara ringkas untuk menjaga visibilitas instansi di mesin pencarian Google dan YouTube.

Di sisi lain, platform TikTok dimanfaatkan dengan narasi yang lebih dinamis, kreatif, dan personal. Meskipun konten yang diunggah seringkali selaras dengan informasi di Instagram (seperti pengumuman operasional posko mudik atau peringatan hari besar), TikTok memberikan ruang untuk penyajian yang lebih cair melalui penggunaan musik latar yang sedang tren dan penyuntingan video yang lebih cepat. Fokus utama TikTok adalah menurunkan sekat birokrasi, pesan-pesan pemerintah daerah disampaikan dengan cara yang lebih akrab bagi generasi muda, menjadikannya sarana sosialisasi kebijakan yang efektif tanpa terkesan kaku.

Integrasi antara YouTube sebagai basis data visual yang kredibel dan TikTok sebagai kanal distribusi konten yang viral menciptakan ekosistem informasi publik yang saling mendukung. Melalui YouTube, Dinas BMCKTR membangun kredibilitas teknis, sementara melalui TikTok, instansi membangun kedekatan emosional dan jangkauan publik yang lebih luas di Sumatera Barat.



Gambar 4. 21 Beranda Tiktok Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
 Sumber: https://www.tiktok.com/@dinasbmctrprov.sumbar?_r=1&t=ZS-95G3yY8jBdV

Secara keseluruhan, pemanfaatan media sosial oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya strategi komunikasi digital yang terintegrasi, sistematis, dan adaptif terhadap karakteristik audiens di setiap platform. Sinkronisasi antar-platform ini menciptakan sebuah ekosistem informasi publik yang utuh, di mana setiap media memiliki peran spesifik yang saling melengkapi dalam menjalankan fungsi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Instagram berfungsi sebagai etalase visual yang membangun citra profesional dan estetik melalui dokumentasi proyek yang terkurasi. Facebook berperan sebagai pusat literasi kebijakan yang menyajikan kedalaman data teknis dan laporan administratif bagi masyarakat yang membutuhkan informasi substantif. Sementara itu,

YouTube hadir sebagai arsip dokumentasi mendalam dan pusat tutorial instruksional, yang didukung oleh TikTok sebagai kanal distribusi konten yang dinamis dan humanis untuk menjangkau generasi muda.

Pola postingan yang diterapkan menunjukkan konsistensi dalam menjaga identitas visual serta responsivitas yang tinggi terhadap momentum penting, seperti penanganan darurat infrastruktur dan pelayanan publik hari besar. Dengan demikian, pemanfaatan media sosial di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumatera Barat bukan sekadar aktivitas publikasi tambahan, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen strategis yang efektif dalam memperpendek jarak birokrasi, memperkuat keterbukaan informasi publik, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah provinsi secara berkelanjutan.

Tabel 4. 1 Kategorisasi Konten Berdasarkan Postingan

Kategori Konten	Postingan	Frekuensi Muncul
Informasi Publik	Jalur Mudik, Info Jalan Rusak	Tinggi (sangat dominan)
Kinerja Instansi	Peninjauan Proyek, Rapat Koordinasi	Tinggi
Edukasi/Regulasi	Sosialisasi Inpres, Tata Ruang	Sedang
Seremonial/Humanis	Halal Bihalal, Hari Besar, Apel Pagi	Sedang
Penghargaan	ASN Berakhlak, Prestasi Dinas	Rendah

Sumber: *Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat*

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menerapkan strategi konten yang sangat berorientasi pada kebutuhan publik dan transparansi kinerja. Hal ini terlihat dari dominasi kategori Informasi Publik dan Kinerja Instansi. Konten informasi publik, seperti informasi jalur mudik dan pemeliharaan jalan, menempati urutan prioritas tertinggi karena memiliki nilai manfaat langsung bagi masyarakat. Grafik postingan pada kategori ini biasanya

meningkat tajam pada momentum tertentu, yang menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai kanal informasi darurat dan operasional yang responsif.

Sementara itu, kategori Kinerja Instansi melalui dokumentasi peninjauan proyek dan rapat koordinasi berfungsi sebagai bukti akuntabilitas. Narasi visual yang ditampilkan melalui foto-foto alat berat di lapangan dan kunjungan pejabat teknis bertujuan untuk membangun kepercayaan publik bahwa pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat berjalan sesuai rencana dan diawasi secara ketat.

Pada tingkat frekuensi sedang, terdapat konten Edukasi dan Regulasi serta Seremonial/Humanis. Konten edukasi, seperti sosialisasi Instruksi Presiden, menunjukkan upaya dinas dalam melakukan literasi kebijakan agar masyarakat memahami landasan hukum pembangunan. Di sisi lain, konten seremonial seperti "Halal Bihalal" atau ucapan hari besar berfungsi untuk menyeimbangkan citra instansi agar terlihat lebih humanis dan dekat dengan masyarakat, sehingga komunikasi tidak terkesan kaku atau melulu soal teknis pekerjaan umum.

Terakhir, kategori Penghargaan muncul dengan frekuensi yang lebih rendah namun memiliki nilai strategis yang tinggi. Unggahan mengenai apresiasi terhadap ASN atau prestasi dinas berfungsi untuk meningkatkan motivasi internal sekaligus menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang mengelola infrastruktur daerah. Secara keseluruhan, kategorisasi ini menunjukkan bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang telah berhasil membagi porsi konten secara proporsional antara kewajiban administratif, fungsi pelayanan, dan pembangunan citra positif di ruang digital.

Tabel 4. 2 Perbandingan Media Digital Berdasarkan Fungsi dan Target Pengguna

NO	MEDIA	FUNGSI	TARGET
1	Website	Sebagai pusat informasi utama	Semua generasi (terutama dewasa dan pekerja)
2	Instagram	Penyebaran informasi singkat	Gen Z dan Millennial
3	YouTube	Edukasi dan dokumentasi	Gen Z-dewasa
4	TikTok	Edukasi cepat dan promosi	Gen Z
5	Facebook	Penyebaran informasi umum	Dewasa (dominan Millennial)

Sumber: Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap media digital memiliki fungsi dan target pengguna yang berbeda dalam mendukung penyebaran informasi publik. Website berfungsi sebagai pusat informasi utama yang menyajikan informasi secara lengkap, rinci, dan terstruktur. Oleh karena itu, website dapat diakses oleh semua generasi, terutama masyarakat dewasa dan pekerja yang membutuhkan informasi resmi dan mendalam. Instagram dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi singkat dengan tampilan visual yang menarik, seperti poster dan infografis. Media ini lebih banyak digunakan oleh generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, sehingga efektif untuk menyampaikan informasi secara cepat dan mudah dipahami.

YouTube berfungsi sebagai media edukasi dan dokumentasi melalui konten video yang lebih detail. Dengan penyajian audiovisual, informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan, mulai dari generasi muda hingga dewasa. TikTok digunakan sebagai media edukasi cepat dan promosi melalui video singkat yang kreatif dan menarik. Platform ini sangat populer di kalangan Gen Z, sehingga efektif untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu informasi dalam waktu singkat.

Sementara itu, Facebook dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi umum dalam bentuk teks, gambar, maupun video. Pengguna Facebook cenderung

berasal dari kalangan dewasa, seperti milenial dan generasi X, sehingga media ini masih relevan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama yang tidak aktif di platform lain seperti Instagram atau TikTok. Dengan demikian, perbedaan fungsi dan target pengguna pada setiap media digital menunjukkan pentingnya pemanfaatan berbagai platform secara bersamaan agar penyebaran informasi publik dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat secara lebih efektif dan menyeluruh.

4.3 Kelebihan dan Kekurangan Pemanfaatan Website dan Media Sosial dalam Penyebaran Informasi Publik

Dalam era digital saat ini, pemanfaatan website dan media sosial menjadi sarana penting dalam penyebaran informasi publik oleh instansi pemerintah. Meskipun memberikan berbagai kelebihan, namun penggunaan kedua media tersebut juga memiliki kekurangan yang dapat mempengaruhi efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat secara digital.

4.3.1 Kelebihan Pemanfaatan Website dan Media Sosial dalam Penyebaran Informasi Publik.

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan website dan media sosial sebagai media penyebaran informasi publik karena kelebihannya dalam menyampaikan informasi secara cepat, luas, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kelebihan pada Website, antara lain:

1. Sebagai Pusat Data: Website berfungsi seperti perpustakaan digital yang menyimpan berbagai informasi dan dokumen penting, seperti dokumen teknis, aturan tata ruang, dan SOP pelayanan secara lengkap dan resmi.

2. Informasi Lebih Valid dan Terpercaya: Website jadi sumber utama untuk mencari data yang sifatnya resmi, sehingga lebih bisa dipercaya dibandingkan sumber lain.
3. Fleksibilitas Pengelolaan Konten: Website memiliki kelebihan karena dapat dikelola dan diatur secara langsung oleh pengelola tanpa bergantung pada sistem algoritma seperti pada media sosial. Hal ini memungkinkan informasi yang dipublikasikan dapat ditampilkan secara lebih terstruktur, lengkap, dan mudah dikendalikan sesuai kebutuhan instansi.
4. Mudah Mencari Informasi: Pengguna bisa dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan lewat submenu yang sudah tersusun rapi, misalnya data sarana prasarana atau progres pembangunan dan menu lainnya.

Kelebihan Media Sosial, antara lain:

1. Penyebaran Informasi yang Cepat (*Real-Time*): Informasi seperti penanganan bencana, perbaikan jalan, atau agenda penting bisa langsung sampai ke masyarakat dalam waktu yang sangat cepat, bahkan hitungan detik.
2. Jangkauan Lebih Luas: Media sosial bisa menjangkau berbagai kalangan, mulai dari anak muda lewat TikTok atau Instagram sampai masyarakat umum melalui Facebook.
3. Adanya Interaksi Dua Arah: Tidak cuma menyampaikan informasi, tapi juga memungkinkan komunikasi langsung antara instansi dan masyarakat lewat komentar atau pesan, sehingga terlihat lebih terbuka dan responsif.
4. Tampilan Lebih Menarik: Informasi yang awalnya rumit bisa dibuat lebih sederhana lewat infografis atau video singkat, jadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

5. Ada Notifikasi Postingan: Memungkinkan pengguna mendapatkan informasi terbaru secara cepat dan *real-time* tanpa harus membuka aplikasi secara terus-menerus.

4.3.2 Kekurangan Pemanfaatan Website dan Media Sosial dalam Penyebaran Informasi Publik.

Walaupun telah dimanfaatkan sebagai media informasi publik, website dan media sosial pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat masih memiliki beberapa kelemahan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatannya.

Kekurangan pada website, antara lain:

1. Update Informasi Lebih Lama: Informasi yang tersedia pada website belum sepenuhnya diperbarui secara berkala, sehingga masih terdapat data atau berita yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
2. Kurang Dikenal oleh Masyarakat: Tidak semua masyarakat mengetahui atau terbiasa mengakses website resmi, sehingga pemanfaatannya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat kunjungan website dibandingkan dengan penggunaan media sosial yang lebih populer dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.
3. Membutuhkan Koneksi yang Lebih Stabil: Tampilan website terkadang lebih kaku dan membutuhkan kuota atau koneksi yang lebih stabil dibandingkan aplikasi media sosial yang lebih mudah dibuka dimana saja.

Kekurangan pada media Sosial, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Pengelolaan media sosial di Dinas BMCKTR masih belum optimal karena hanya ditangani oleh satu orang admin.

Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam pembuatan konten, desain, serta respons terhadap interaksi masyarakat, sehingga pengelolaan media sosial belum dapat dilakukan secara maksimal dan konsisten.

2. **Jangkauan Tidak Merata:** Tidak semua masyarakat mengikuti atau mengakses akun media sosial resmi Dinas BMCKTR, sehingga informasi yang disampaikan melalui platform tersebut belum mampu menjangkau seluruh kalangan masyarakat secara menyeluruh.
3. **Bergantung pada Algoritma Platform:** Penyebaran informasi melalui media sosial dipengaruhi oleh sistem algoritma yang dimiliki platform, sehingga tidak semua postingan dapat muncul di beranda pengguna. Akibatnya, informasi yang bersifat penting sekalipun berpotensi tidak tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.

4.4 Upaya Mengatasi Kekurangan Pemanfaatan Website dan Media Sosial

Dalam Penyebaran Informasi Publik

Menanggapi berbagai kekurangan dalam pengelolaan media digital Dinas BMCKTR merumuskan serangkaian langkah strategis untuk mengoptimalkan penyebaran informasi publik. Upaya ini difokuskan pada penguatan sinergi antara website sebagai pusat data dan media sosial sebagai kanal interaksi cepat.

1. **Optimalisasi Pengelolaan Website**
 - a. Melakukan pembaruan informasi secara rutin dan terjadwal, misalnya dengan menetapkan waktu khusus untuk update berita, pengumuman, dan dokumen penting. Hal ini bertujuan agar informasi yang tersedia selalu sesuai dengan kondisi terbaru dan tidak tertinggal.
 - b. Menunjuk atau menambah pengelola website, karena pengelolaan yang hanya dilakukan oleh satu orang seringkali membuat proses update menjadi

lambat. Dengan adanya pembagian tugas, pengelolaan akan lebih efektif dan terkontrol.

- c. Meningkatkan sosialisasi website kepada masyarakat, meskipun tautan website telah dicantumkan pada media sosial dan surat resmi, pemanfaatannya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan seperti membuat konten yang secara aktif mengarahkan masyarakat untuk mengunjungi website, misalnya dengan menampilkan cuplikan informasi dan ajakan (*call to action*). Selain itu, website perlu dijadikan sebagai sumber utama informasi yang lebih lengkap dibandingkan media sosial, sehingga masyarakat terdorong untuk mengaksesnya ketika membutuhkan informasi yang lebih rinci karena masih banyak masyarakat yang lebih sering menggunakan media sosial dibandingkan membuka website.
 - d. Memperbaiki tampilan dan kemudahan akses website, seperti membuat menu yang lebih sederhana, mempercepat loading, serta memastikan website dapat dibuka dengan baik di handphone. Dengan begitu, masyarakat tidak kesulitan saat mencari informasi.
2. Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial
- a. Menyajikan konten yang jelas, singkat, tetapi tetap informatif, karena media sosial cenderung digunakan untuk informasi cepat.
 - b. Mengatasi keterbatasan SDM dengan pembagian tugas sederhana, misalnya satu orang fokus pada konten, dan satu lagi pada respon komentar (jika memungkinkan), agar pengelolaan lebih maksimal.

- c. Menentukan jadwal posting yang konsisten, seperti beberapa kali dalam seminggu, agar akun tetap aktif dan informasi tidak tenggelam oleh algoritma.
- d. Memanfaatkan fitur yang tersedia, seperti story, highlight, atau pin postingan penting agar informasi tetap mudah ditemukan oleh masyarakat.
- e. Memberikan respon yang cukup cepat terhadap pertanyaan masyarakat, agar meningkatkan kepercayaan dan citra positif instansi.

3. Integrasi Website dan Media Sosial

- a. Menggunakan platform media sosial untuk sarana penyebaran informasi awal, seperti pengumuman singkat, lalu mengarahkan ke website untuk penjelasan lebih lengkap.
- b. Menjadikan website sebagai pusat informasi utama, sehingga semua informasi resmi dan detail tetap tersimpan rapi di satu tempat.
- c. Membuat keterkaitan yang jelas antara keduanya, misalnya setiap postingan media sosial selalu merujuk ke website, sehingga masyarakat terbiasa mengakses keduanya bersamaan.

